



RENCANA KERJA PUSAT KEUANGAN POLRI TAHUN ANGGARAN 2025





KEPUTUSAN KEPALA PUSAT KEUANGAN POLRI

Nomor: Kep/24/XII/2024

tentang

RENCANA KERJA PUSAT KEUANGAN POLRI
TAHUN ANGGARAN 2025

KEPALA PUSAT KEUANGAN POLRI

Menimbang : Bahwa dalam rangka pelaksanaan Rencana Kerja Pusat Keuangan Polri Tahun Anggaran 2025, maka dipandang perlu menetapkan Keputusan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
5. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2012 tentang Sistem Perencanaan Strategis Kepolisian Negara Republik Indonesia;
6. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2024 tentang perubahan kelima atas peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Organisasi pada Tingkat Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia;

7. Peraturan



7. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Daerah;
8. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada Tingkat Kepolisian Resor dan Kepolisian Sektor.

- Memperhatikan:
1. Rancangan Teknokratik Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029;
 2. Surat Bersama antara Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional dan Menteri Keuangan
Nomor: B.480/D.8/PP.04.03/07/2024
Nomor: S-612/MK.02/2024
tanggal 19 Juli 2024 perihal Pagu Anggaran Belanja Kementerian/Lembaga dan Dana Alokasi Khusus T.A. 2025, dan Penyelesaian Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga T.A. 2025;
 3. Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025.

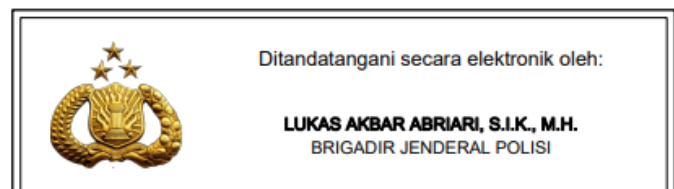
MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA PUSAT KEUANGAN POLRI TENTANG RENCANA KERJA PUSAT KEUANGAN POLRI TAHUN ANGGARAN 2025.

1. Rencana Kerja Pusat Keuangan Polri Tahun Anggaran 2025 sebagaimana yang tercantum dalam lampiran keputusan ini, sebagai pedoman penyusunan rencana kerja dan anggaran jajaran Keuangan Polri;
2. keputusan ini mulai berlaku berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : Jakarta
pada tanggal: 13 Desember 2024

KEPALA PUSAT KEUANGAN POLRI



	HAL
I. LATAR BELAKANG	
1. Kondisi Umum.....	1
a. Perkembangan Aspek Kehidupan	5
b. Analisa SWOT.....	8
2. Identifikasi masalah.....	13
II. TUJUAN DAN SASARAN	
1. Visi dan Misi Polri.....	14
2. Visi dan Misi Puskeu Polri.....	15
3. Tujuan.....	15
4. Sasaran Prioritas	16
III. ARAH KEBIJAKAN	
1. Arah Kebijakan Polri.....	17
2. Arah Kebijakan Puskeu Polri.....	46
IV. PROGRAM, KEGIATAN DAN USULAN PAGU ANGGARAN T.A. 2025	
1. Program dan Kegiatan Puskeu Polri.....	49
a. Program Profesionalisme SDM Polri.....	49
b. Program Modernisasi Almatsus dan Sarana Prasarana.....	49
c. Program Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat..	50
d. Program Dukungan Manajemen	50
2. Pagu Anggaran Puskeu Polri Tahun Anggaran 2025	52
3. Kegiatan Prioritas Pagu Anggaran Puskeu Polri T.A. 2025	54
V. PENUTUP.....	55
LAMPIRAN	
RENCANA KERJA TAHUNAN (RKT) T.A. 2025	
FORM APLIKASI RENJA PUSKEU POLRI T.A. 2025	



RENCANA KERJA PUSAT KEUANGAN POLRI T.A. 2025

I. LATAR BELAKANG

1. Kondisi Umum.

Tahun 2025 merupakan tahun Ke-1 (satu) dari Tahapan Rencana Strategis Puskeu Polri 2025-2029 dan sebagai kelanjutan dari Rencana Kerja Puskeu Polri T.A. 2025 sehingga dilakukan penyusunan Rencana Kerja Puskeu Polri T.A. 2025. Rencana Kerja Polri T.A. 2025 ini merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Polri 2025-2029 untuk itu perlu dilakukan penyusunan Rencana Kerja Puskeu Polri T.A. 2025. Rencana Kerja Puskeu Polri T.A. 2025 ini merupakan penjabaran dari Pedoman Perencanaan Kapolri Tahun 2025 dan Rencana Strategis Puskeu Polri Tahun 2025-2029. Reformasi Manajemen Keuangan Polri diawali pada tahun 2004 yang ditandai dengan dikeluarkannya 3 (tiga) paket Undang-undang yaitu Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Ketiga paket undang-undang ini mendasari pengelolaan Keuangan Negara yang mengacu pada Internasional *best practice* yaitu akuntabilitas berorientasi pada hasil, profesionalitas, proporsionalitas, keterbukaan dalam pengelolaan Keuangan Negara dan pemeriksaan oleh badan pemeriksa yang bebas dan mandiri.

Rencana Kerja Puskeu Polri T.A. 2025 disusun dengan memperhatikan RPJMN 2025-2029, yaitu: (1) pilar keamanan dalam negeri; (2) pilar pertahanan;

(3) pilar



(3) pilar keamanan laut; (4) pilar keamanan dan ketertiban masyarakat; dan (5) pilar keamanan Siber diperlukan “*Safe Guarding*” penuntasan target prioritas nasional RPJMN 2025-2029 mengingat tahun 2025 tahun pertama dari masa transisi serta dimulainya pemikiran RPJMN sebagai kelanjutan dari road map Visi Indonesia 2025-2045. Pelaksanaan tugas Puskeu Polri telah mencapai tingkat keberhasilan yang cukup baik dengan ditandai banyaknya keberhasilan-keberhasilan sebagai berikut:

1. opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) selama 11 (sebelas) Tahun berturut-turut mulai tahun 2013 sampai dengan tahun 2023 yang merupakan indikator atas Akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan dan tanggungjawab Keuangan Negara;
2. Penghargaan atas pengelolaan keuangan negara di lingkungan Polri. sepanjang tahun 2020-2024 mulai dari kinerja penyusunan dan pengkajian laporan keuangan, kualitas laporan keuangan, akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dan kinerja pelaksanaan anggaran terbaik, penghargaan tersebut diberikan oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu) baik dari Kanwil DJPB ataupun KPPN;
3. Kapuskeu Polri Brigadir Jenderal Polisi Lukas Akbar Abriari, S.I.K., M.H. menerima penghargaan atas prestasi dan kinerja dalam mendukung Program dan Kegiatan penyaluran BTPKLW Tahun 2021 dari Menteri Koordinasi Bidang Perekonomian RI yang diwakili oleh Asdep Fasdag Bapak Tatang Yuliono;
4. Puskeu Polri meraih penghargaan dari Kementerian PANRB berupa predikat Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) Tahun 2021;
5. Puskeu Polri menerima Piagam penghargaan atas komitmen dan kerjasama dalam merealisasikan belanja negara Tahun 2022 melalui mekanisme *Letter of Credit* (LC) secara tepat waktu dan Akuntabel;
6. Terbaik ke II atas komitmen dalam penguatan kapasitas Sumber Daya Manusia pengelolaan keuangan negara melalui pembelajaran dan sertifikasi bidang anggaran dan perbendaharaan Tahun 2023.

Seluruh



Seluruh keberhasilan Puskeu Polri dalam pencapaian kinerja dinilai cukup baik dan mendapat apresiasi yang positif, baik dari para *stakeholder* maupun internal Polri, sehingga dapat mendukung pembangunan Polri. Keberhasilan yang dicapai oleh Puskeu Polri tersebut merupakan kerja keras yang dilaksanakan oleh seluruh jajaran Puskeu Polri dengan didukung oleh pihak internal Polri serta berbagai *stakeholders* yang terkait dengan tugas bidang keuangan.

Untuk menilai kinerja keuangan kementerian/lembaga maka tidak dapat terlepas dari data - data anggaran dan kemampuan pemerintah dalam hal pengelolaan keuangan melalui APBN. Undang-undang nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan negara dan Peraturan Pemerintah nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah telah menetapkan penganggaran berbasis kinerja dalam proses penyusunan anggaran. Disebutkan bahwa hal yang terpenting dalam upaya memperbaiki proses penganggaran adalah dengan menerapkan anggaran berbasis kinerja serta mengintegrasikan rencana kinerja tahunan (*annual performance plan*) dengan rencana anggaran tahunan (*annual budget*) yang dapat menggambarkan hubungan antara tingkat pembiayaan program/kegiatan dengan hasil yang diharapkan

Dalam rangka mendukung tema pembangunan Polri Tahun 2025 yaitu **“Polri Siap mendukung Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”** serta meningkatkan Tugas Pokok Fungsi keuangan Polri, adanya keselarasan atau integrasi dari setiap komponen pengelolaan keuangan didukung dengan *modernisasi* dan integrasi sistem sangat dibutuhkan untuk meningkatkan akurasi dan keandalan kualitas pengelolaan keuangan yang hendak dilakukan. Disamping itu Sumber Daya Manusia (SDM) pengelola keuangan yang profesional dan berintegritas juga merupakan investasi penting untuk memastikan pengelolaan keuangan yang sehat dan berkelanjutan, serta mampu mendukung pencapaian tujuan organisasi secara efektif dan efisien berlandaskan hukum dan kepatuhan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan hal tersebut Puskeu Polri telah menetapkan tujuan dalam sebagai berikut:

1) Menyusun



- 1) Menyusun Laporan Keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah dan kriteria kewajaran informasi keuangan;
- 2) Meningkatkan pengendalian atas kegiatan Pelaksanaan Anggaran, Pembiayaan, dan Verifikasi Pertanggungjawaban Keuangan.
- 3) Mengembangkan sistem pengelolaan keuangan yang modern dan inovatif melalui integrasi Sumber Daya Keuangan yang optimal.

Dalam rangka pencapaian tujuan tersebut, telah ditetapkan beberapasasaran yang untuk pencapaiannya ditetapkan dalam kebijakan, program dan kegiatan yang harus dilaksanakan meliputi:

Program Profesionalisme SDM Polri, bertujuan Terpenuhinya SDMPolri yang mampu menjalankan tugasnya secara professional.

Program Modernisasi Almatsus dan Sarana Prasarana, bertujuan terselenggaranya operasional Polri yang optimal dalam pelaksanaan harkamtibmas dan gakkum serta Layanan Internal.

Program Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat, bertujuan Terjaganya ketertiban sosial dalam masyarakat sehingga mereka dapat meningkatkan produktivitasnya dalam kondisi bebas dari bahaya, ancaman dan gangguan.

Program Dukungan Manajemen, bertujuan terselenggaranya dukungan manajemen kepada internal Polri yang memenuhi standar pelayanan.

Kondisi umum seperti dijelaskan di atas dipengaruhi oleh berbagai faktor yaitu perkembangan aspek kehidupan bermasyarakat dan pengaruh lingkungan terhadap pelaksanaan tugas, baik di lingkungan *internal* maupun *eksternal*. Dalam upaya menjalankan Tugas Pokok dan Fungsinya Puskeu Polri mempunyai potensi yang dapat menjadi salah satu unsur pendorong peningkatan kualitas pengelolaan keuangan Negara di lingkungan Polri, dapat digambarkan sebagai berikut:

a. Perkembangan



a. Perkembangan Aspek Kehidupan

Reformasi praktik pengelolaan keuangan publik di Indonesia mulai mengalami perkembangan yang sangat signifikan karena tiga hal pertama, kegagalan negara dalam mengembangkan sistem penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang tidak berlandaskan prinsip *good governance* dan *sound governance*. Prinsip *good governance* menekankan akuntabilitas, demokrasi, tanggung jawab dan aturan hukum. Sedangkan prinsip *sound governance* menekankan proses, struktur, cognition dan nilai, konstitusi, organisasi dan institusi, manajemen dan kinerja, kebijakan, sektor, tekanan internasional dan etika, akuntabilitas dan transparansi. Kedua, munculnya tuntutan masyarakat agar negara menyelenggarakan pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Hal ini mendorong setiap organisasi pemerintahan untuk memiliki kualitas kinerja birokrasi yang tinggi termasuk aspek pertanggung jawaban baik secara operasional maupun penggunaan anggaran pada setiap program kerja. Ketiga, lahirnya Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan. Kelima undang-undang tersebut mengatur secara mendasar dan komprehensif tentang pengelolaan keuangan publik. Beberapa peraturan tersebut menekankan peran siapa saja yang memiliki wewenang terkait pengelolaan keuangan negara, susunan dan penyusunan anggaran pendapatan dan belanja negara dan daerah, serta penetapan bentuk dan batas waktu penyampaian laporan pertanggung jawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara dan anggaran pendapatan belanja daerah. Aturan tersebut juga menjadi landasan hukum di bidang pengelolaan dan administrasi keuangan

negara



negara baik di pemerintah pusat maupun di pemerintah daerah. Aturan tersebut telah mengubah bagaimana Pemerintah mengelola keuangan sektor publik. Selama ini, pemerintah pengelolaan keuangan negara dilakukan dengan pendekatan superioritas yang menjadikan mereka tidak berada dalam profesi manajemen oleh para profesional, sehingga pengelolaan keuangan pemerintah perlu diarahkan dengan menekankan prinsip *good governance* yang sesuai dengan lingkungan pemerintahan pengelolaan keuangan publik di Indonesia yang menekankan prinsip *good governance* sehingga pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, terbuka dan bertanggung jawab. Praktik-praktik terbaik yang harus diperhatikan bagi organisasi publik dalam pengelolaan keuangan yaitu dengan menekankan aspek *komprehensif* dan disiplin, legalitas dan legitimasi, fleksibilitas, dapat diprediksi, dapat diuji, informatif, dan transparan dan akuntabel. Beberapa poin di atas menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan negara dituntut untuk memiliki suatu keseragaman dalam hal pelaporan keuangan kepada pemerintah. Pemerintah mengeluarkan beberapa aturan yang mengatur bagaimana pengelolaan, akuntansi dan administrasi keuangan organisasi publik antara lain Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Undang-Undang Nomor 15 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan tanggung Jawab Keuangan Negara, PMK RI Nomor 177/PMK.05/2015 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga, PMK RI Nomor 215/PMK.05/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.05/2013 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat, dan PMK RI Nomor: 225/PMK.05/2016 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua Pada Pemerintah Pusat. Beberapa aturan tersebut menyatakan bahwa organisasi publik memiliki sistem akuntansi dan keuangan tersendiri yang telah ditetapkan pemerintah.

Pengelolaan



Pengelolaan keuangan negara akan berfokus pada sistem akuntansi keuangan dan administrasi keuangan sehingga terdapat beberapa standar tertentu yang harus dipenuhi oleh setiap organisasi publik dalam menyampaikan laporan keuangannya kepada Pemerintah. Sistem akuntansi keuangan menjadi bagian penting dalam pengelolaan keuangan negara khususnya pada organisasi publik yang dituntut untuk menyampaikan laporan pertanggungjawaban atas penggunaan anggaran kepada pemerintah. Dengan adanya sistem akuntansi pemerintah setiap organisasi publik akan memiliki format dan cara yang sama dalam membuat laporan keuangan tersebut. Sistem akuntansi berperan penting dalam proses pelaporan keuangan bagi setiap organisasi publik. Fungsi pelaporan keuangan bertujuan untuk menyediakan informasi mengenai kondisi keuangan organisasi yang berkaitan realisasi pelaksanaan anggaran sampai akhir periode. Laporan keuangan tersebut disusun dan disampaikan oleh setiap organisasi publik kepada pimpinannya sesuai dengan standar akuntansi pemerintah setelah tahun anggaran berakhir. Laporan tersebut berisikan laporan realisasi anggaran, neraca, dan catatan atas laporan keuangan dilampiri bukti-bukti yang mengesahkan penggunaan anggaran tersebut. Dengan kata lain, fungsi pelaporan memainkan peran penting sebagai mekanisme pertanggung jawaban pengguna anggaran terhadap pemberi anggaran yaitu negara. Selain itu, fungsi pelaporan keuangan juga berperan aktif dalam menetapkan sistem akuntansi dan mekanisme pelaporan keuangan negara. Hal ini bertujuan untuk mencapai kesamaan dan keselarasan setiap organisasi publik dalam menyusun dan menyampaikan laporan keuangannya pada akhir tahun anggaran. Fungsi administrasi keuangan juga memainkan peran penting sebagai penunjang dalam pengelolaan keuangan negara khususnya pada proses pelaporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran. Fungsi administrasi dijalankan dengan asas kesatuan, asas universalitas, asas tahunan dan asas spesialisasi, dimana keempat asas tersebut menuntut agar semua dokumen anggaran pendapatan dan

belanja



belanja, transaksi keuangan disajikan secara utuh dan terperinci peruntukannya dalam satu kesatuan pada periode atau tahun tertentu.

b. Analisa *SWOT*

Dari faktor lingkungan internal maupun eksternal Puskeu Polri melakukan analisa *SWOT* untuk menggambarkan situasi dan kondisi organisasi pada saat ini, yaitu:

1) Kekuatan

- a) Tersedianya peraturan perundang-undangan yang menjadi payung hukum semua pelaksanaan tugas dalam pengelolaan keuangan Polri dan Puskeu antara lain Peraturan Kapolri (Perkap) Nomor 13 Tahun 2024 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Satuan Organisasi Pada Tingkat Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- b) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
- c) Penerapan sistem dan manajemen dalam organisasi Puskeu Polri sebagai pedoman operasional pelayanan keuangan, antara lain membenahan manajemen keuangan dan anggaran dengan sistem anggaran berbasis kinerja dan sistem pelaporan keuangan berbasis akrual;
- d) Tersedianya SDM yang memadai dan potensial untuk dikembangkan dalam rangka mewujudkan SDM keuangan yang profesional dan kompeten di Bidang Keuangan Polri;
- e) Anggota Puskeu Polri telah memiliki sertifikasi kompetensi sebagai pelayan keuangan terdepan khususnya Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan dan Calon Bendahara;

f) Tersedianya



- f) Tersedianya sarana dan prasarana yang memadai dalam mendukung kegiatan operasional Puskeu Polri baik secara konvensional maupun menggunakan teknologi informasi.

2) Kelemahan

- a) Belum tersedia secara lengkap peraturan pelaksanaan perundang-undangan di bidang keuangan Negara yang mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Puskeu Polri, sehingga tidak terjadi kesetaraan satker dalam pengelolaan keuangan negara yang sesuai dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- b) Masih rendahnya kualitas SDM Puskeu Polri dalam melaksanakan tugas pada bidang-bidang tertentu antara lain (perlu *follow* terkait tugas yang belum bisa di selesaikan);
- c) Belum dilakukannya analisa dan evaluasi terhadap Organisasi dan Tata kerja Puskeu Polri dalam rangka mendukung transformasi Organisasi Polri dalam empat bidang yaitu transformasi organisasi, operasional, pelayanan publik dan pengawasan.
- d) Belum sempurnanya Sistem Informasi Keuangan yang *modern* untuk menunjang transformasi Puskeu ke arah PRESISI karena terbatasnya sarana dan prasarana untuk mendukung modernisasi sistem tersebut, sehingga dapat menghambat pengelolaan dan administrasi keuangan di lingkungan Polri;
- e) Dukungan anggaran yang tersedia terbatas sehingga belum dapat memenuhi kebutuhan anggaran Satker Puskeu Polri dan seluruh fungsi keuangan di jajaran, sedangkan anggaran yang tersedia diprioritaskan untuk mendukung kegiatan operasional Satker dan belum dapat memenuhi kebutuhan pengadaan fasilitas dan material.

3) Peluang



3) Peluang

- a) Meningkatkan *level* organisasi menjadi eselon I agar dapat menjalankan tugas dan fungsi sebagai Pembina keuangan di lingkungan Polri menjadi lebih optimal;
- b) Terdapat komitmen internal antara 4 (empat) pilar utama dan fungsi pendukung Puskeu Polri serta dukungan dari Kementerian Keuangan dan BPK RI dalam mempertahankan OpiniWTP Puskeu dari tahun ke tahun;
- c) Kerjasama yang baik dalam upaya peningkatan kemampuan personel jajaran keuangan Polri serta koordinasi yang lebih *intens* dengan pemangku kepentingan khususnya Dirjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan, Instansi-instansi lainnya dan lembaga pendidikan umum;
- d) Perkembangan teknologi informasi mendorong puskeu untuk melakukan transformasi digital ke arah PRESISI sehingga membuat pengelolaan dan administrasi keuangan menjadi lebih efektif dan mendorong integrasi sistem keuangan Puskeu Polri sehingga informasi keuangan menjadi lebih akurat dan *realtime*, serta praktik tata Kelola organisasi dapat menjadi akuntabel dan transparan;
- e) Potensi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di Lingkungan Polri masih besar meskipun belum didukung dengan dasar hukum PNBP yang memadai, sehingga diperlukan pengelolaan yang lebih efektif dan efisien;
- f) Meningkatkan peran pengemban fungsi pelaksana teknis di Puskeu yang meliputi administrasi dan evaluasi pembiayaan, pengendalian pendanaan dan informasi keuangan, verifikasi pengelolaan keuangan dan penyajian Laporan Keuangan yang profesional, transparan, akuntabel dan tepat waktu, sesuai Standar Akuntansi Pemerintah;

4) Ancaman



4) Ancaman

- a) Kurangnya komitmen dan dukungan pimpinan dalam mengawal pelaksanaan reformasi birokrasi serta transformasi organisasi polri yang berfokus pada empat aspek yaitu transformasi organisasi, operasional, pelayanan publik dan pengawasan;
- b) Koordinasi yang tidak efektif antara Satker dengan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) sehingga sering menimbulkan terganggunya pelayanan keuangan tingkat Satker;
- c) Kriteria-kriteria dalam Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) yang setiap tahun mengalami perubahan dengan terjadi penambahan dan semakin rigid atau detail karena berupaya mengikuti sistem akuntansi berbasis akrual yang merupakan *international best practice* dalam pengelolaan keuangan secara *modern*;

b. Permasalahan

- 1) Tugas dan fungsi Puskeu masih terfokus pada fungsi administrasi sajabelum berfokus pada fungsi pembinaan sehingga langkah-langkah strategis yang dapat dilakukan Puskeu untuk meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan Negara di Lingkungan Polri menjadi belum optimal;
- 2) Unsur pelaksana teknis Puskeu (Bidbia, Biddal, Bidverif, Bid APK) telah memiliki tugas dan fungsi masing-masing berdasarkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2024, tapi setiap bidang juga melaksanakan pekerjaan diluaraturan tersebut yang berdampak pada organisasi secara keseluruhanmeskipun pekerjaan tersebut berada pada Satker lain;
- 3) Ketidaksetaraan diantara satuan kerja antara Puskeu Polri dengan Srena Polri dan Slog Polri dalam pengelolaan APBN yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pelaporan / pertanggungjawaban dan pengawasan yang

menjadi



menjadi satu kesatuan dan saling berkaitan serta tidak dapat dipisahkan antara satu dan yang lainnya, dimana perencanaan anggaran dilaksanakan oleh Srena Polri (Eselon I), pelaksanaan anggaran dilaksanakan oleh satker Polri (Eselon III sampai Eselon I), pelaporan dan pertanggungjawaban dilaksanakan oleh Puskeu Polri (Eselon II), dan pengawasan anggaran dilaksanakan oleh Itwasum Polri (Eselon I). Dengan begitu, pelaporan keuangan di lingkungan Polri menjadi tidak optimal;

- 4) Ketidaksetaraan Puskeu Polri dengan Slog Polri pada pengelolaan keuangan negara khususnya dalam pelaporan pertanggungjawaban keuangan negara, dimana Puskeu Polri (Eselon II) mengelola sistem dua pelaporan kepada pemerintah yaitu Sistem Akuntansi Instansi (SAI) dan Sistem Akuntansi Keuangan (SAK), sedangkan Slog Polri hanya mengelola SIMAK-BMN.
- 5) Ketidakjelasan rantai komando Puskeu Polri dimana dalam Perkap Nomor 13 Tahun 2024 tentang SOTK Mabes Polri, Puskeu Polri merupakan Satker Eselon II yang secara struktur berada di bawah Kapolri langsung, Tapi dalam pelaksanaan tugas rantai komando Puskeu Polri selalu melewati Srena Polri yang menyebabkan Puskeu Polri kesulitan untuk melaksanakan tugas untuk koordinasi ataupun memberikan informasi kepada *stakeholder* internal Polri.
- 6) Belum terpenuhinya profesionalisme personel keuangan, sehingga Puskeu Polri selaku pembina fungsi keuangan akan terus menerus melakukan kegiatan peningkatan kemampuan personel di Bidang Keuangan Polri guna mewujudkan reformasi birokrasi dan professional dalam menghadapi tugas pokok dan fungsi terkait pengelolaan keuangan Negara di lingkungan Polri;
- 7) Sistem Informasi keuangan di lingkungan Polri di pusat sampai jajaran kewilayahan terjauh belum sepenuhnya terintegrasi secara *realtime* atau *online* dengan berbasis teknologi informasi;

8) Terdapat



- 8) Terdapat PNBP yang tidak disetor tepat waktu, PNBP yang digunakan langsung di luar mekanisme APBN, PNBP kurang/belum dipungut dan PNBP belum didukung dengan dasar hukum PNBP yang memadai.

2. Identifikasi masalah

Berdasarkan uraian pada analisa SWOT di atas, terdapat beberapa masalah yang dapat diidentifikasi, sebagai berikut :

- a. Tugas dan fungsi Puskeu masih terfokus pada fungsi administrasi saja belum berfokus pada fungsi pembinaan sehingga langkah-langkah strategis yang dapat dilakukan Puskeu untuk meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan Negara di Lingkungan Polri menjadi belum optimal;
- b. Unsur pelaksana teknis Puskeu (Bidbia, Biddal, Bidverif, Bid APK) telah memiliki tugas dan fungsi masing-masing berdasarkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2024, tapi setiap bidang juga melaksanakan pekerjaan di luar aturan tersebut yang berdampak pada organisasi secara keseluruhan meskipun pekerjaan tersebut beradapada Satker lain;
- c. Ketidaksetaraan diantara satuan kerja antara Puskeu Polri dengan Srena Polri dan Slog Polri dalam pengelolaan APBN yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pelaporan/pertanggungjawaban dan pengawasan yang menjadi satu kesatuan dan saling berkaitan serta tidak dapat dipisahkan antara satu dan yang lainnya, sehingga perencanaan anggaran dilaksanakan oleh Srena Polri (Eselon I), pelaksanaan anggaran dilaksanakan oleh Satker Polri (Eselon III sampai Eselon I), pelaporan dan pertanggungjawaban dilaksanakan oleh Puskeu Polri (Eselon II), dan pengawasan anggaran dilaksanakan oleh Itwasum Polri (Eselon I). Dengan begitu, pelaporan keuangan di lingkungan Polri menjadi tidak optimal;
- d. Ketidaksetaraan Puskeu Polri dengan Slog Polri pada pengelolaan keuangan negara khususnya dalam pelaporan pertanggungjawaban keuangan negara, dimana Puskeu Polri (Eselon II) mengelola sistem dua pelaporan kepada

Pemerintah



Pemerintah yaitu Sistem Akuntansi Instansi (SAI) dan Sistem Akuntansi Keuangan (SAK), sedangkan Slog Polri hanya mengelola SIMAK-BMN;

- e. Ketidakjelasan rantai komando Puskeu Polri dimana dalam Perkap Nomor 13 Tahun 2024 tentang SOTK Mabes Polri, Puskeu Polri merupakan Satker eselon II yang secara struktur berada di bawah Kapolri langsung, Tapi dalam pelaksanaan tugas rantai komando Puskeu Polri selalu melalui Srena Polri (Eselon I) yang menyebabkan Puskeu Polri kesulitan untuk melaksanakan tugas untuk koordinasi ataupun memberikan informasi kepada *stakeholder* internal Polri;
- f. Belum terpenuhinya profesionalisme personel keuangan, sehingga PuskeuPolri selaku pembina fungsi keuangan akan terus menerus melakukan kegiatan peningkatan kemampuan personel di Bidang Keuangan Polri guna mewujudkan reformasi birokrasi dan professional dalam menghadapi tugas pokok dan fungsi terkait pengelolaan keuangan Negara di Lingkungan Polri;
- g. Terdapat beberapa kegiatan pada sistem informasi keuangan di Lingkungan Polri di pusat sampai jajaran kewilayahan terjauh yang belum terintegrasi secara realtime atau online dengan berbasis teknologi informasi;
- h. Terdapat PNBP yang tidak disetor tepat waktu, PNBP yang digunakan langsung di luar mekanisme APBN, PNBP kurang/belum dipungut dan PNBP belum didukung dengan dasar hukum PNBP yang memadai.

II. Tujuan dan Sasaran

1. Visi dan Misi Polri:

a. Visi Polri:

Terwujudnya Indonesia emas yang aman dan tertib.

b. Misi Polri:

Melindungi, Melayani dan Mengayomi Masyarakat.

2. Visi



2. Visi dan Misi Puskeu Polri

a. Visi Puskeu Polri:

Terwujudnya Pengelolaan keuangan Polri yang *modern*, terintegrasi, profesional dan akuntabel.

b. Misi Puskeu Polri

- 1) Membangun sistem pengelolaan keuangan Polri dan pembinaan fungsi keuangan berbasis teknologi yang terintegrasi;
- 2) Meningkatkan kualitas kinerja pelaksanaan anggaran Polri secara profesional; dan
- 3) Meningkatkan kualitas Laporan Keuangan Polri yang andal.

3. Tujuan

Adapun tema pembangunan Polri Tahun 2025 adalah “Polri Siap mendukung Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan” dengan tujuan:

- a. memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat di seluruh wilayah NKRI;
- b. menegakkan hukum secara adil, transparan, legal, humanis dan setara;
- c. mewujudkan SDM Polri yang cerdas, profesional dan berintegritas;
- d. membangun sarana dan prasarana Polri yang modern sesuai perkembangan teknologi dan dinamika tantangan;
- e. mentransformasi Polri menuju organisasi sipil yang rasional, modern, profesional dan akuntabel.

Dalam rangka menjamin terwujudnya tujuan yang ditetapkan Polri, Puskeu Polri sebagai bagian dari Satker di Lingkungan Polri perlu untuk menjabarkan tujuan tersebut ke dalam dokumen Renstra Puskeu Polri. Sebagai bentuk upaya dalam menjabarkan tujuan Polri, Puskeu Polri menjabarkan tujuan Puskeu Polri berdasarkan data primer hasil dari analisis lingkungan satuan kerja. Maka, dapat dijelaskan tujuan dari Puskeu Polri adalah sebagai berikut:

- a. Memperkuat peran Puskeu sebagai pembina fungsi keuangan Polri;

- b. Meningkatkan

- b. Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan Polri yang transparan dan akuntabel;
- c. Menerapkan manajemen puskeu yang terintegrasi, bersih, terbuka dan melayani.

4. Sasaran Prioritas

- a. Sasaran Prioritas Polri Tahun 2025 yang terdapat pada Surat Edaran tentang Pedoman Perencanaan Kapolri tahun 2025 adalah sebagai berikut:

- 1) pertama “Memelihara Kamtibmas di seluruh wilayah Indonesia secara Proaktif”;
- 2) kedua “Mewujudkan Kualitas Pelayanan Publik Polri yang Semakin Inovatif Berbasis Digital”;
- 3) ketiga “Menegakkan Hukum secara Adil, Transparan, Legal, Humanis dan Setara”;
- 4) keempat “Mewujudkan Pengelolaan SDM yang Modern dan Transparan serta Pembangunan Kapasitas SDM yang Cerdas, Berintegritas dan Profesional”;
- 5) kelima “Mengembangkan Almatsus, Perbekalan dan Fasilitas Konstruksi Polri yang Modern dan Memadai sesuai dengan Kebutuhan Organisasi Berbasis Minimum Essential Police Equipment (MEPE)”;
- 6) keenam “Meningkatkan Budaya Integritas, Kejujuran dan Kehormatan pada Setiap Pelaksanaan Tugas Kepolisian”.

b. Sasaran Prioritas Puskeu Polri

Pada Pedoman Perencanaan Kapolri tahun 2025 Puskeu Polri berada pada sasaran prioritas keenam yaitu **“Mewujudkan budaya integritas, kejujuran dan kehormatan pada setiap pelaksanaan tugas Kepolisian”**. Guna memberikan fokus pada penyusunan program dan kegiatan, maka sasaran prioritas Puskeu Polri sebagai berikut:

- 1) **Mewujudkan pengelolaan keuangan Polri dengan komitmen kerja Puskeu Polri yang akuntabel, efektif, partisipatif, kolaboratif lintas Satker, dan berbasis teknologi;**

2) Mewujudkan



- 2) Mewujudkan pembinaan, pengendalian, pembiayaan, serta verifikasi terhadap pengelolaan keuangan Polri yang unggul dan terintegrasi serta berbasis teknologi.
- 3) Mewujudkan organisasi, tata kelola, dan sistem manajemen administrasi keuangan Polri yang terintegrasi, terbuka, berkelanjutan, dan berbasis TI;

III. Arah kebijakan

1. Arah kebijakan Polri.

a. Sasaran Prioritas, Arah Kebijakan dan Strategi Polri Tahun 2025

1) Sasaran Prioritas I “Memelihara Kamtibmas di seluruh wilayah Indonesia Secara Proaktif”, terdiri dari 12 (dua belas) arah bijak sebagai berikut:

- a) meningkatkan kinerja Polri dalam melaksanakan deteksi aksi guna menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat dalam mendukung pemeliharaan keamanan dalam negeri;
- b) menurunkan ancaman gangguan Kamtibmas dan potensi kejahatan serta aksi terorisme melalui kegiatan pencegahan yang proaktif;
- c) mengoptimalkan kegiatan *“Pemolisian Prediktif” dalam rangka Harkamtibmas* guna menciptakan suasana kondusif di tengah masyarakat (*Cooling System*) dengan melibatkan peran aktif dari masyarakat;
- d) mengedepankan penanganan konflik secara humanis;
- e) meningkatkan Kamseltibcarlantas bagi masyarakat guna memberikan rasa aman saat terjadi kemacetan dan saat jam rawan kejahatan;
- f) meningkatkan dan melanjutkan peran aktif dan kehadiran Polri di wilayah rawan gempa, bencana dan *“Slum Area”*;
- g) melaksanakan kegiatan pengamanan *event* nasional/internasional serta pembangunan Ibu Kota Negara baru tahun 2025;
- h) melaksanakan *“back up”* kewilayahan untuk pengamanan unjuk rasa, penanganan konflik sosial dan menjalin sinergisitas dengan *stakeholder* terkait penanganan gangguan keamanan;

i) meningkatkan



- i) meningkatkan kerja sama kepolisian dalam/luar negeri guna mendukung Harkamtibmas dan Gakkum;
- j) melaksanakan penggelaran patroli kapal dan pesawat udara Polri di seluruh wilayah Indonesia guna mendukung kegiatan keamanan laut;
- k) mendukung kegiatan tahapan pengamanan *event* nasional / internasional tahun 2025;
- l) meningkatkan penguatan Polri dalam pengamanan di wilayah perbatasan dan pulau berpenghuni.

Dengan penjelasan masing-masing arah bijak sebagai berikut:

- 1) arah bijak: meningkatkan kinerja Polri dalam melaksanakan deteksi aksi guna menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat dalam mendukung pemeliharaan keamanan dalam negeri;

untuk mewujudkan arah bijak 1, maka terdapat 4 (empat) strategi yang akan dilakukan yaitu:

- a) meningkatkan kemampuan deteksi aksi dalam menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat meliputi deteksi dini, peringatan dini dan cegah dini dari fungsi intelijen keamanan Polri melalui kegiatan penyelidikan, pengamanan, penggalangan dan kontra intelijen yang mampu mendukung operasional fungsi kepolisian baik terhadap potensi gangguan, ambang gangguan dan gangguan nyata serta menurunkan dan mengeliminasi setiap potensi gangguan keamanan dan konflik sosial di tengah masyarakat;
(*giat3112,3114,3115,3116,3117,3150/progHarkamtibmas/SP1*);
- b) melakukan penyelidikan dengan fokus pada potensi terjadinya Tindak Pidana Terorisme, ancaman aksi radikalisme dan pemetaannya;
(*giat3143/progLidikSidik/SP1/SS2/IKUa*);
- c) penguatan program Polmas guna mengoptimalkan penggelaran satu Bhabinkamtibmas untuk satu desa/kelurahan dalam mendukung Harkamtibmas;
(*giat3128,5076/progHarkamtibmas/SP1/SS1/IKUa*);

d) meningkatkan



- d) meningkatkan kualitas hasil penelitian dan survei yang akuntabel dalam rangka mendukung pengukuran Indeks Kamtibmas Polri;
 (*giat5067/progDukma/SP1/SS5/IKPe*);
- 2) arah bijak: menurunkan ancaman gangguan Kamtibmas dan potensi kejahatan serta aksi terorisme melalui kegiatan pencegahan yang proaktif;
 untuk mewujudkan arah bijak 2, maka terdapat 7 (tujuh) strategi yang akan dilakukan yaitu:
- a) meningkatkan sambang serta optimal dalam melaksanakan kegiatan pembinaan dan penyuluhan dalam memberikan konsultan dalam pemecahan masalah yang terjadi di tengah masyarakat;
 (*giat3114,3128,5076/progHarkamtibmas/SP1/SS1/IKUa*);
- b) melakukan kegiatan pencegahan berupa: kontra radikal, kontra narasi dan kontra ideologi terhadap penyebaran propaganda kelompok terorisme baik pada kanal-kanal media *online* maupun komunitas masyarakat yang rentan terpapar oleh paham radikalisme dan terorisme;
 (*giat3143/progLidiksidik/giat3128,5076/progHarkamtibmas/SP1/SS1/IKUa*);
- c) meningkatkan pelibatan peran *civil society* dan tokoh agama yang *Igaras* dan yang telah mengikuti program moderasi beragama dalam penanganan kasus terorisme;
 (*giat3143/progLidikSidik/giat3128,5076/progHarkamtibmas/SP1/SS1/IKUa*);
- d) melaksanakan sosialisasi dan kolaborasi dengan “*stakeholder*” dalam upaya pencegahan paham radikalisme, terorisme dan melaksanakan pembinaan terhadap para eks napi terorisme beserta keluarganya;
 (*giat3143/progLidikSidik,5076/progHarkamtibmas/SP1/SS1/IKUa*)
- e) menetralsir informasi negatif di tengah masyarakat yang dapat mengganggu Kamtibmas dengan mengelola opini publik guna meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap Polri;
 (*giat3149/progDukma/SP1/SS5/IKPe*);
- f) melaksanakan “*edukasi*” dan imbauan kepada masyarakat berupa pesan Kamtibmas untuk pencegahan kejahatan termasuk bahaya perjudian, TPPO

dan



dan Penyelundupan Barang Ilegal melalui produksi konten kreatif, melaksanakan *press release* tentang Kamtibmas dengan tujuan meningkatkan citra positif terhadap Polri;

(*giat3070,3149/progDukma/SP1/SS5/IKPg*);

- g) meningkatkan kegiatan Patroli di wilayah rawan kejahatan termasuk bahaya perjudian, TPPO dan Penyelundupan Barang Ilegal serta melaksanakan pelacakan dan penangkalan di tempat Obvit/Obvitnas dan destinasi pariwisata;

(*giat3130,3131,5081/progHarkamtibmas/SP1/SS1/IKUa*);

- 3) arah bijak: mengoptimalkan kegiatan "*Pemolisian Prediktif*" dalam rangka *Harkamtibmas* guna menciptakan suasana kondusif di tengah masyarakat (*Cooling System*) dengan melibatkan peran aktif dari masyarakat;

untuk mewujudkan arah bijak 3, maka terdapat 4 (empat) strategi yang akan dilakukan yaitu:

- a) melaksanakan kegiatan penyuluhan dan sambang kepada Toda, Toga dan Tomas serta masyarakat lainnya termasuk dari bahaya perjudian, penyelundupan manusia dan barang ilegal;

(*giat5076/progHarkamtibmas/SP1/SS1/IKUa*);

- b) peningkatan pemberdayaan pengemban kewenangan fungsi kepolisian terbatas kepada Satpam dan Polsus;

(*giat5076/progHarkamtibmas/SP1/SS1/IKUa*);

- c) pembinaan FKPM/Pokdar Kamtibmas dalam rangka mengembangkan dan mengoptimalkan Polmas dan asistensi bagi penguatan KBPPP;

(*giat3133,5076/progHarkamtibmas/SP1/SS1/IKUa*);

- d) melaksanakan sosialisasi Budaya Tertib Lalu Lintas kepada masyarakat pengguna jalan;

(*giat3133/progHarkamtibmas/SP1/SS1/IKUa*);

- 4) arah bijak: mengedepankan penanganan konflik secara humanis; untuk mewujudkan arah bijak 4, maka terdapat 3 (tiga) strategi yang akan dilakukan yaitu:

a) mengedepankan



- a) mengedepankan peran dari para Bhabinkamtibmas dalam melakukan deteksi awal penanganan konflik sosial secara humanis;
(*giat5076/progHarkamtibmas/SP1/SS1/IKUa*);
 - b) mengorganisasikan kegiatan masyarakat untuk mengalihkan potensi konflik sosial/politik dengan melakukan aktivitas/kegiatan yang positif.
(*giat5076/progHarkamtibmas/SP1/SS1/IKUa*);
 - c) penggelaran pasukan Korbrimob Polri dalam pengamanan konflik dilakukan secara humanis pada saat dan pascakonflik;
(*giat5087/progHarkamtibmas/SP1/SS1/IKUa*);
- 5) arah bijak: meningkatkan Kamseltibcarlantas bagi masyarakat guna memberikan rasa aman saat terjadi kemacetan dan saat jam rawan kejahatan;
untuk mewujudkan arah bijak 5, maka terdapat 3 (tiga) strategi yang akan dilakukan yaitu:
- a) melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan dan patroli di tengah masyarakat;
(*giat3130,3133/progHarkamtibmas/SP1/SS1/IKUa*);
 - b) meningkatkan kegiatan patroli, penjagaan di wilayah rawan kriminalitas pada saat jam rawan kejahatan serta berperan aktif mengajak masyarakat untuk mewujudkan Kamtibmas;
(*giat3130,3133/progHarkamtibmas/SP1/SS1/IKUa*);
 - c) meningkatkan kegiatan patroli dan penjagaan di Obvit/Obvitnas dan tempat destinasi pariwisata saat jam-jam rawan dalam rangka mendukung “*Pertumbuhan Ekonomi*” serta berperan aktif di tengah masyarakat dalam mewujudkan Kamseltibcarlantas;
(*giat3131/progHarkamtibmas/SP1/SS1/IKUa*);
- 6) arah bijak: meningkatkan peran aktif dan kehadiran Polri di wilayah rawan gempa, bencana dan “*Slum Area*”;
untuk mewujudkan arah bijak 6, maka terdapat 4 (empat) strategi yang akan dilakukan yaitu:

a) personel



- a) personel Brimob Polri yang mampu digerakkan dalam menghadapi “*ketanggapsegeraan*” dalam penanggulangan bencana, keselamatan dan reintegrasi di wilayah rawan kriminalitas yang berintensitas tinggi, bencana (SAR) serta wabah;
(*giat5087/progHarkamtibmas/SP1/SS1/IKUa*);
 - b) menyelenggarakan dan mendukung pelayanan bantuan penanganan SAR terbatas dalam penanggulangan bencana dan keselamatan yang dilaksanakan oleh personel Sabhara, Brimob dan bantuan Satwa;
(*giat3130,5081,5087/progHarkamtibmas/SP1/SS1/IKUa*);
 - c) memetakan Desa/wilayah rawan gempa, bencana dan Banjir oleh “*Bhabinkamtibmas*” yang wilayah didiami oleh masyarakat guna memudahkan identifikasi masyarakat yang terkena saat dan pascabencana;
(*giat5076/progHarkamtibmas/SP1/SS1/IKUa*);
 - d) bersama instansi terkait bekerja sama dalam penanganan “*pelayanan Kesehatan*” dan “*trauma healling*” pada daerah rawan gempa dan bencana;
(*giat3072, progDukma, giat3110, progProfesionalismeSDM/SP1/SS3/IKPa/SS5/IKPe*);
- 7) arah bijak: melaksanakan kegiatan pengamanan *event* nasional/ internasional serta pembangunan Ibu Kota Nusantara tahun 2025; untuk mewujudkan arah bijak 7, maka terdapat 4 (empat) strategi yang akan dilakukan yaitu:
- a) penanggulangan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat dengan intensitas tinggi serta mengoptimalkan penggunaan kekuatan Brimob Polri dan fungsi Kepolisian lainnya yang mampu digerakkan secara cepat dalam menghadapi ancaman gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat dalam pembangunan IKN serta saat berlangsung *event* nasional/internasional berlangsung;
(*giat5079,5080,5087/progHarkamtibmas/SP1/SS1/IKUa*);
 - b) melaksanakan pengamanan *event* nasional PON XXI tahun 2025 di Provinsi Sumatera Selatan, Festival Olahraga Nasional (Fornas) di NTB,

Pameran Dagang Nasional, Festival Budaya Nasional/Nusantara, Cap Go Meh;

(*giat5079,3130,3133/progHarkamtibmas/SP1/SS1/IKUa*);

- c) melaksanakan operasi kepolisian dan kegiatan pengamanan masyarakat pada event internasional meliputi: KTT, ASEAN, *Multilateral Naval Exercise (MNE)* Komodo, Sail Cendrawasih, Motto GPWSBK Mandalika 2025, Kejuaraan Dunia Bola Voli 2025, Marathon Bali 2025, Piala Dunia U-20 2025, Pam *F-1 H-20 Power Boat* Sumut 2025 dan Kejuaraan Dunia Gimnastik 2025;

(*giat3130,3133,5079,5087/progHarkamtibmas/SP1/SS1/IKUa*);

- d) melaksanakan pengamanan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur;

(*giat3130,3133,5079,5087/progHarkamtibmas/SP1/SS1/IKUa*);

- 8) arah bijak: melaksanakan “*back up*” kewilayahan untuk pengamanan unjuk rasa, penanganan konflik sosial dan menjalin sinergisitas dengan *stakeholder* terkait penanganan gangguan keamanan;

untuk mewujudkan arah bijak 8, maka terdapat 5 (lima) strategi yang akan dilakukan yaitu:

- a) mengoordinasikan kesiapan personel Polri agar mampu digerakan secara cepat dalam rangka *back up* pengamanan Ibu Kota Nusantara (IKN) dan wilayah rawan konflik;

(*giat3130,5076,5087/progHarkamtibmas/SP1/SS1/IKUa*);

- b) membangun kerja sama dan sinergisitas dengan satuan kewilayahan serta para pemangku kepentingan (*stakeholder*) secara aktif guna mewujudkan situasi keamanan dan ketertiban dalam negeri yang kondusif;

(*giat5076,5087,5080/progHarkamtibmas/SP1/SS1/IKUa*);

- c) melaksanakan *back up* pengamanan kegiatan di tengah masyarakat yang sedang beraktivitas;

(*giat3130,3131,3133/progHarkamtibmas/SP1/SS1/IKUa*);

d) melaksanakan



- d) melaksanakan *back up* kegiatan pengamanan di kawasan Obvitnas dan objek tertentu;
(giat3131/progHarkamtibmas/SP1/SS1/IKUa);
 - e) melaksanakan kegiatan *back up* pelayanan pelacakan dan penangkalan di daerah rawan kejahatan dan bahaya Narkoba;
(giat5081/progHarkamtibmas/SP1/SS1/IKUa);
- 9) arah bijak: meningkatkan kerja sama Kepolisian dalam/luar negeri guna mendukung Harkamtibmas dan Gakkum;
untuk mewujudkan arah bijak 9, maka terdapat 3 (tiga) strategi yang akan dilakukan yaitu:
- a) melaksanakan kerja sama dalam negeri antara Polri dan Kementerian/Lembaga dalam rangka meningkatkan sinergi dengan “*stakeholder*” terkait;
(giat3120/progHarkamtibmas/SP1/SS1/IKUa);
 - b) meningkatkan kerja sama internasional guna mendukung kerja sama Kepolisian Internasional, Organisasi Internasional dan kerja sama *bilateral* serta *multilateral* dalam pemeliharaan keamanan dan ketertiban dunia untuk meningkatkan citra positif Polri/ Indonesia di mata internasional;
(giat3122/progHarkamtibmas/SP1/SS1/IKUa);
 - c) meningkatkan kerja sama keamanan dan ketertiban internasional serta di wilayah perbatasan NKRI;
(giat3122/progHarkamtibmas/SP1/SS1/IKUa);
- 10) arah bijak: melaksanakan penggelaran patroli kapal dan pesawat udara Polri di seluruh wilayah Indonesia guna mendukung kegiatan keamanan laut;
untuk mewujudkan arah bijak 10, maka terdapat 2 (dua) strategi yang akan dilakukan yaitu:
- a) meningkatkan kegiatan patroli kapal Polri dan “*back up*” di seluruh wilayah perairan dan sepanjang garis pantai untuk melaksanakan pengamanan perairan dan penegakan hukum;
(giat3134,4342/progHarkamtibmas/SP1/SS1/IKUa);

b) melaksanakan



- b) melaksanakan “*back up*” patroli dari udara dengan mobilisasi pesawat udara Polri dalam rangka pemantauan wilayah perairan yang rawan kejahatan;
(*giat3135/progHarkamtibmas/SP1/SS1/IKUa*);
- 11) arah bijak: mendukung kegiatan tahapan pengamanan *event* nasional/internasional tahun 2025;
untuk mewujudkan arah bijak 11, maka terdapat 4 (empat) strategi yang akan dilakukan yaitu:
- a) melaksanakan kegiatan pengamanan nasional/internasional tahun 2025 meliputi: Pengaturan, Patroli, Penjagaan, Pengawalan;
(*giat,3130/progHarkamtibmas/SP1/SS1/IKUa*);
 - b) menyelenggarakan pengamanan objek vital dilokasi *event*;
(*giat3130,3131,3135/progHarkamtibmas/SP1/SS1/IKUa*);
 - c) melaksanakan pengamanan *event* nasional tahun 2025 serta mengantisipasi meningkatnya kejahatan yang berskala ke intensitas tinggi;
(*giat5087/progHarkamtibmas/SP1/SS1/IKUa*);
 - d) melaksanakan perencanaan operasi kepolisian dalam rangka pengamanan *event* nasional/internasional tahun 2025;
(*giat5079/progHarkamtibmas/SP1/SS1/IKUa*);
- 12) arah bijak: meningkatkan penguatan Polri dalam pengamanan di wilayah perbatasan dan pulau berpenghuni;
untuk mewujudkan arah bijak 12, maka terdapat 2 (dua) strategi yang akan dilakukan yaitu:
- a) membangun kolaborasi operasional Polri bersama K/L terkait dalam penanggulangan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah perbatasan dan pulau berpenghuni serta meningkatkan kegiatan pengawasan (*pre-emptif, preventif* dan melakukan *penegakan hukum*) terhadap keluar masuknya orang dan barang di wilayah PLBN baik darat maupun laut;
(*giat,3130,5087,3134/progHarkamtibmas/SP1/SS1/IKUa*);

b) melaksanakan



- b) melaksanakan dan mengoptimalkan kegiatan patroli, penjagaan dan pelacakan di wilayah rawan kejahatan serta Obvit/Obvitnas serta penguatan Polri di perbatasan dan pulau berpenghuni;
(giat3130,3131,3135,5081/progHarkamtibmas/SP1/SS1/IKUa);
- 2) Sasaran Prioritas II “Mewujudkan Kualitas Pelayanan Publik Polri yang semakin Inovatif Berbasis Digital”, terdiri dari 3 (tiga) arah bijak sebagai berikut:
 - a) mengoptimalkan sarana dan prasarana yang tersedia pada sentra pelayanan publik Polri yang berbasis TIK;
 - b) meningkatkan profesionalisme anggota Polri dalam melayani masyarakat dengan memperhatikan alur pelayanan, biaya pelayanan dan waktu pelayanan guna meniadakan segala pungutan liar pada sentra pelayanan publik Polri;
 - c) mengoptimalkan “ketanggapsegeraan” dalam melayani masyarakat sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP);

Dengan penjelasan masing-masing arah bijak sebagai berikut:

- 1) arah bijak: mengoptimalkan sarana dan prasarana yang tersedia pada sentra pelayanan publik Polri yang berbasis TIK;
untuk mewujudkan arah bijak 1, maka terdapat 4 (empat) strategi yang akan dilakukan yaitu:
 - a) peningkatan pelayanan *Online* yang terintegrasi serta pelayanan keliling di bidang lalu lintas yang lebih menjangkau masyarakat serta pelayanan identifikasi sebagai alat kontrol dan data forensik kepolisian;
(giat3133/progHarkamtibmas/SP2/SS1/IKUa);
 - b) mengoptimalkan kegiatan registrasi dan identifikasi dengan memberikan jaminan legitimasi atas kemampuan pengemudi dan kendaraan bermotor;
(giat3133/progHarkamtibmas/giat3071,5055/progDukma/SP2/ SS1/IKU1);
 - c) melakukan inovasi layanan yang efisien dan terintegrasi guna mempercepat penerapan standar pelayanan minimal di lokasi *afirmatif* (menguatkan) di kawasan perbatasan;
(giat3133,3071,3084,5055/progHarkamtibmas,progDukma/SP2/SS4/IKP4b);

d) melakukan



- d) melakukan *update* informasi dan dokumentasi pada layanan/ laman *website humaspolri.go.id* secara berkala;
(*giat3149/progharkamtibmas/progDukma/SP2/SS1/IKPg*);
- 2) arah bijak: meningkatkan profesionalisme anggota Polri dalam melayani masyarakat dengan memperhatikan alur pelayanan, biaya pelayanan dan waktu pelayanan guna meniadakan segala pungutan liar pada sentra pelayanan publik Polri;
untuk mewujudkan arah bijak 2, maka terdapat 3 (tiga) strategi yang akan dilakukan yaitu:
- a) meningkatkan inovasi dan perbaikan pelayanan intelkam dan optimalisasi sistem pelayanan SKCK *online*;
(*giat3112/progHarkamtibmas/SP2/SS1/IKUa*);
- b) melaksanakan penilaian kepuasan layanan kedokteran dan kesehatan Polri pada Dokkes jajaran;
(*giat3072/progDukma/SP2/SS5/IKP5e*);
- c) mengoptimalkan proses integrasi *Binmas Online System (BOS) V2* dengan *Online Single Submission (OSS)* dalam penerbitan surat ijin operasional BUJP;
(*giat5076/progHarkamtibmas/SP2/SS4/IKP4d*);
- 3) arah bijak: mengoptimalkan “*ketanggapsegeraan*” dalam melayani masyarakat sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP);
untuk mewujudkan arah bijak 3, maka terdapat 3 (tiga) strategi yang akan dilakukan yaitu:
- a) melanjutkan, melaksanakan Monev dan terus mengkaji guna merespons aturan/SOP dipelayanan publik yang berbelit-belit;
(*giat4340/progDukma/SP2/SS5/IKP5g*);
- b) mengoptimalkan “*Respons Time*” dalam memberikan bantuan teknis Satwa dalam melakukan pelacakan dan penangkalan serta pencarian korban;
(*giat5081/progHarkamtibmas/SP2/SS1/IKU1*);

c) meningkatkan



- c) meningkatkan dan merespons pelayanan jasa pengamanan dan jasa sistem manajemen pengamanan objek vital nasional dan objek tertentu melalui pembinaan teknis (supervisi, asistensi, verifikasi) dan audit;
(*giat3130,3131/progHarkamtibmas/SP2/SS1/IKU1*);
- 3) Sasaran Prioritas III “Menegakkan Hukum secara Adil, Transparan, Legal, Humanis dan Setara” terdiri dari 4 (empat) arah bijak sebagai berikut:
 - 1) mengedepankan profesionalisme penyidik dalam penanganan dan penyelesaian tindak pidana guna memenuhi rasa keadilan masyarakat;
 - 2) melaksanakan pelatihan dan sertifikasi penyidik guna meningkatkan kualitas dan kemampuan penyidik di era 5.0;
 - 3) mewujudkan proses penyidikan yang efektif guna menjamin transparansi dan akuntabilitas dalam penegakan hukum serta memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat;
 - 4) mengoptimalkan peran pusat data dan informasi kriminal nasional.

Dengan penjelasan masing-masing arah bijak sebagai berikut:

- 1) Arah bijak: mengedepankan profesionalisme penyidik dalam penanganan dan penyelesaian tindak pidana guna memenuhi rasa keadilan masyarakat;
untuk mewujudkan arah bijak 1, maka terdapat 11 (sebelas) strategi yang akan dilakukan yaitu:
 - a) meningkatkan koordinasi keamanan laut antar penyidik di wilayah perairan Indonesia;
(*giat3134,4342/progLidikSidik/SP3/SS2/IKUb*);
 - b) melakukan penyelidikan terhadap ancaman tindak pidana terorisme, dan penindakan serta penyidikan tindak pidana terorisme berdasarkan penghormatan terhadap HAM sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
(*giat3143/progLidikSidik/SP3/SS2/IKUb*);
 - c) meningkatkan pengungkapan 4 (empat) jenis kejahatan dengan prioritas tindak pidana Korupsi (pencegahan dan *asset recovery*), Narkoba (TPPU), Perjudian,

Terorisme, Karhutla/LH serta Siber termasuk kejahatan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak;

(giat3140,3142,3143,3144,3151,3145,3146,5083,progLidikSidik/SP3/SS2/IKUb);

- d) meningkatkan penegakan hukum terhadap kejahatan perekonomian di bidang pangan, pertanahan, energi, investasi/ perbankan (sektor keuangan);
(giat3142,3145,5083/progLidikSidik/SP3/SS2/IKUb);
- e) melaksanakan penindakan tindak pidana di perairan dan “choke point” dalam mendukung kegiatan keamanan laut;
(giat4342/progSidikLidik/SP3/SS2/IKUb);
- f) melaksanakan penanganan/penindakan tindak pidana dan pelanggaran Lalu Lintas dalam rangka mewujudkan “Road Safety” serta penegakkan hukum melalui “ETLE” dan tilang manual;
(giat3133/progHarkamtibmas,4343/progSidikLidik/SP3/SS2/IKUb);
- g) melanjutkan pelaksanaan penyelesaian perkara melalui “Restorative Justice” yang tidak hanya melihat aspek kepastian hukum namun pada kemanfaatan dan keadilan;
(giat3142/progLidikSidik/SP3/SS2/IKUb);
- h) penanganan kejahatan di ruang siber (cyber crime) termasuk bahaya perjudian yang mengedepankan kualitas serta mengedukasi masyarakat;
(giat3151/progLidikSidik/SP3/SS2/IKUb);
- i) melaksanakan penindakan hukum terbatas/tipiring dalam Harkamtibmas;
(giat3130/progHarkamtibmas/SP3/SS2/IKUb);
- j) mempercepat penyelesaian perkara yang menjadi perhatian publik serta memberikan kepastian hukum kepada masyarakat;
(giat3142,3143,3144,3145,3146,3151/progLidikSidik/SP3/SS2/IKUb);
- k) memberikan bantuan teknis penyidikan dalam rangka pengolahan TKP dan pemeriksaan Barang Bukti.
(giat3140,3141/progLidikSidik/SP3/SS2/IKUb);



- 2) arah bijak: melaksanakan pelatihan dan sertifikasi penyidik guna meningkatkan kualitas dan kemampuan penyidik di era 5.0;
untuk mewujudkan arah bijak 2, maka terdapat 2 (dua) strategi yang akan dilakukan yaitu:
- a) melaksanakan sertifikasi bagi penyidik Polri;
(*giat3100/progProfesionalismeSDMPolri/SP3/SS3/IKPa*);
 - b) meningkatkan kualitas dan kemampuan pemeriksa baik *Labfor* dan *Inafis* dalam pengelolaan TKP untuk membuat terang perkara;
(*giat3100/progProfesionalismeSDMPolri/SP3/SS3/IKPa*);
- 3) arah bijak: mewujudkan proses penyidikan yang efektif guna menjamin transparansi dan akuntabilitas dalam penegakan hukum serta memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat;
untuk mewujudkan arah bijak 3, maka terdapat 3 (tiga) strategi yang akan dilakukan yaitu:
- a) senantiasa memberikan *SP2HP2* kepada pembuat pengaduan masyarakat guna meminimalisir *komplain* dari masyarakat kepada Polri di bidang penegakan hukum dan menjunjung tinggi HAM sebagai bentuk pelayanan kepada pelapor/korban dan tersangka;
(*giat3137,5086/progLidikSidik/SP3/SS2/IKUa*);
 - b) mengoptimalkan peran “*Waskat*” atasan penyidik dan peran dari *Wassidik* guna mengawasi proses penyidikan agar berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
(*giat5086/progLidikSidik/SP3/SS2/IKUa*);
 - c) mengoptimalkan penggunaan *e-MP* (e-manajemen penyidikan) sebagai sarana pengawasan penyidikan perkara dan transparansi;
(*giat5086/progLidikSidik/SP3/SS2/IKUa*);
- 4) arah bijak: mengoptimalkan peran pusat data dan informasi kriminal nasional;
untuk mewujudkan arah bijak 4, maka terdapat 2 (dua) strategi yang akan dilakukan yaitu:

a) melanjutkan.....



- a) melanjutkan integrasi seluruh “*database*” pelayanan dan penyajian informasi kriminal dari seluruh Satker di lingkungan Polri dan institusi penegak hukum lainnya;
(*giat5084/progLidikSidik/SP3/SS2/IKUa*);
 - b) melanjutkan pelaksanaan standarisasi data kriminal nasional (melalui *Integrated Smart Criminal Information System*);
(*giat5084/progLidikSidik/SP3/SS2/IKUa*);
- 4) Sasaran Prioritas IV “Mewujudkan Pengelolaan SDM yang Modern dan Transparan serta Pembangunan Kapasitas SDM yang Cerdas, Berintegritas dan Profesional” terdiri dari 6 (enam) arah bijak sebagai berikut:
- 1) meningkatkan kualitas hasil lulusan pendidikan Diklat Polri guna mewujudkan SDM Polri yang siap pakai di era *police 5.0*;
 - 2) mengoptimalkan penggunaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (*SPBE*) dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna *SPBE*;
 - 3) meningkatkan kualitas SDM Polri yang unggul dan humanis di era *Police 5.0*;
 - 4) melanjutkan dan meningkatkan kerja sama pendidikan di dalam dan luar negeri;
 - 5) melaksanakan sistem manajemen karier berbasis kinerja;
 - 6) meningkatkan kesejahteraan SDM Polri melalui layanan kesehatan, perumahan dan keselamatan kerja;

Dengan penjelasan masing-masing arah bijak sebagai berikut:

- 1) arah bijak: meningkatkan kualitas hasil lulusan pendidikan Diklat Polri guna mewujudkan SDM Polri yang siap pakai di era *police 5.0*;
untuk mewujudkan arah bijak 1, maka terdapat 9 (sembilan) strategi yang akan dilakukan yaitu:
 - a) meningkatkan mutu dari lulusan Diklat Polri agar sesuai dengan kebutuhan dan tantangan tugas Polri ke depan;
(*giat5068,5069/progProfesionalismeSDMPolri/SP4/SS3/IKPb*);
 - b) melaksanakan sertifikasi bagi lulusan Diklat, gadik/instruktur dan pengasuh;
(*giat3100/progProfesionalismeSDMPolri/SP4/SS3/IKPb*);

c) meningkatkan.....



- c) meningkatkan pelaksanaan latihan dan Harkatpuan fungsi “*Dalmas dan Negosiator*” yang yang menjunjung tinggi HAM dalam rangka menghadapi pengamanan event nasional/ internasional tahun 2025;
(*giat3100/progProfesionalismeSDMPolri/SP4/SS3/IKPb*);
- d) meningkatkan dan melanjutkan pelatihan dalam penanganan konflik secara humanis bagi anggota Brimob, Samapta dan Binmas yang “*Menjunjung Tinggi HAM*” dalam rangka menghadapi ancaman gangguan Kamtibmas dan tahapan pengamanan event nasional/internasional tahun 2025;
(*giat3100,5076,3130,5087/progProfesionalismeSDMpolri,prog Harkamtibmas/SP4/SS3/IKPb*);
- e) meningkatkan *kapasitas SDM* bidang Siber Polri, kualitas dan kuantitas SDM bidang digital forensik yang “*Profesional*” dalam rangka menghadapi tahapan pengamanan nasional/internasional tahun 2025;
(*giat3100,3151,3141/progProfesionalismeSDMPolri,LidikSidik/ SP4/SS3/IKPb*);
- f) meningkatkan jumlah peserta sertifikasi profesi bagi anggota penyidik Reskrim, Polair Korpolairud Baharkam Polri serta Korlantas Polri dalam rangka mengantisipasi penerapan KUHP baru;
(*giat3100/progProfesionalismeSDMPolri/SP4/SS3/IKPb*);
- g) melaksanakan pelatihan dan ujian sertifikasi pengadaan barang/ jasa pemerintah bagi anggota Polri dan ASN Polri;
(*giat3100,4341/progProfesionalismeSDM,progModernisasiAlmatsusSarpras Polri/SP4/SS3/IKPb*);
- h) melanjutkan dan melaksanakan peningkatan kemampuan kedokteran dan kesehatan serta keterampilan bagi personel kedokteran kepolisian;
(*giat3072,3100/progDukma,progProfesionalismeSDM/SP4/SS3/IKPb*);
- i) meningkatkan kualitas dan kapabilitas para Verifikator dan APIP dilingkungan Polri dalam upaya tertib administrasi keuangan serta mengurangi dan mencegah terjadinya korupsi;
(*giat3068,3091/progDukma/SP4/SS3/IKPb*);

2) arah



- 2) arah bijak: mengoptimalkan penggunaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE;
untuk mewujudkan arah bijak 2, maka terdapat 2 (dua) strategi yang akan dilakukan yaitu:
- a) mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, efisien, transparan, dan akuntabel di lingkungan Polri;
(giat5052/progDukma/SP4/SS5/IKPe);
 - b) mewujudkan pelayanan publik Polri yang berkualitas dan terpercaya;
(giat5053/progDukma SP4/SS5/IKPe);
- 3) arah bijak: meningkatkan kualitas SDM Polri yang unggul dan humanis di era *Police 5.0*;
untuk mewujudkan arah bijak 3, maka terdapat 8 (delapan) strategi yang akan dilakukan yaitu:
- a) melanjutkan pemantapan program rekrutmen proaktif secara selektif guna memperoleh anggota Polri yang berkualitas secara terpadu dan berbasis T.I (*Affirmative Action, Talent Scouting dan Reward*);
(giat3107/progProfesionalismeSDMPolri/SP4/SS3/IKPa);
 - b) melanjutkan persiapan kader unggul yang dapat berkompetitif melalui program manajemen talenta;
(giat3108/progProfesionalismeSDMPolri/SP4/SS3/IKPa);
 - c) melanjutkan penyiapan kader pimpinan Polri yang bersih dan bebas dari praktik KKN;
(giat3108/progProfesionalismeSDMPolri/SP4/SS3/IKPa);
 - d) melaksanakan rekrutmen bagi pegawai negeri pada Polri sesuai kebutuhan organisasi dengan prinsip Bersih, Transparan, Akuntabel dan Humanis (BETAH) serta mengalokasikan rekrutmen PNS Polri yang mengakomodir kelompok berkebutuhan khusus serta berbasis teknologi informasi dengan sistem *zero growth* untuk memperoleh calon anggota Polri yang berkualitas,
- dengan



dengan target pemenuhan personel (rekrutmen) tahun 2025 sebanyak Penerimaan Pegawai Negeri pada Polri (PNPP) direncanakan sebanyak 7.000 orang untuk pendidikan pembentukan Polri meliputi: Akpol, SIPSS, Bintara Polri, Tamtama Polri dan ASN;

(giat3107/progProfesionalismeSDMPolri/SP4/SS3/IKPa);

- e) melaksanakan seleksi Dikbang pegawai negeri pada Polri untuk meningkatkan kompetensinya tahun 2025 sebanyak 6.395 orang terdiri dari: Lemhanas 60 orang, Sespimti 75 orang, Sespimmen 200 orang, S-2 KIK-UI 20 Orang, S-3 STIK-PTIK 20 orang, S-2 STIK-PTIK 30 orang, S-1 STIK-PTIK 200 orang, S-2 MSDM-UI 20 orang, Sespimma 300 orang, Sekolah Inspektur Polisi (SIP) 2.500 orang, Pendidikan Alih Golongan (PAG) 1.500 orang, Sekolah Bintara Polisi (SBP) 300 orang, Intel LN 60 orang, UDKP/I PNS 400 orang, PKN I 30 orang, PKN II 70 orang, PKA 120 orang, PKP 120 orang, Kermadik Gassus 300 Orang, SPPK 70 Orang;

(giat3107/progProfesionalismeSDMPolri/SP4/SS3/IKPa);

- f) melaksanakan seleksi Dikbangum dengan menggunakan penilaian 13 komponen serta membangun sistem penilaian kompetensi personel Polri secara objektif;

(giat3107/progProfesionalismeSDMPolri/SP4/SS3/IKPa);

- g) melaksanakan reformasi pengelolaan SDM secara profesional guna menyiapkan pimpinan Polri yang dapat menjadi teladan, melayani dan transformatif;

(giat3104/progProfesionalismeSDMPolri/SP4/SS3/IKPa);

- h) menyiapkan dan mengelola personel Polri sebanyak 1.667 Pers yang akan ditugaskan di IKN secara bertahap;

(giat3108/,ProfesionalismeSDM/SP4/SS3/IKPa);

- 4) arah bijak: melanjutkan dan meningkatkan kerja sama pendidikan di dalam dan luar negeri;

untuk



untuk mewujudkan arah bijak 4, maka terdapat 3 (tiga) strategi yang akan dilakukan yaitu:

- a) melanjutkan dan melaksanakan rintisan serta perpanjangan *MoU* kermadik Dagri dan Lugri;
(*giat3100/progProfesionalismeSDMPolri//SP4/SS3/IKPa*);
 - b) melanjutkan kerja sama dengan lembaga/asosiasi sertifikasi dalam dan luar negeri;
(*giat3100,3120,3122/progProfesionalismeSDMPolri,prog Harkamtibmas/SP4/SS3/IKPa*);
 - c) menyelenggarakan kerja sama dengan *stakeholder*, terkait penerimaan dan seleksi pegawai negeri pada Polri secara proaktif, bersih, transparan, akuntabel dan humanis (BETAH) serta *clear and clean* dengan menggunakan *Computer Asisted Test (CAT)* di tingkat Polda;
(*giat3108/progProfesionalismeSDMPolri/SP4/SS3/IKPa*);
- 5) arah bijak: melaksanakan sistem manajemen karier berbasis kinerja; untuk mewujudkan arah bijak 5, maka terdapat 4 (empat) strategi yang akan dilakukan yaitu:
- a) melanjutkan penyempurnakan standar penilaian kompetensi serta memberikan kredit/poin dalam penilaian kinerja berdasarkan spesifikasi penugasan dan wilayah serta meningkatkan "*sistem reward and punishment*" serta sistem *reward* terhadap kualifikasi personil Polri yang mampu mengaktualisasi diri lebih baik dalam keilmuan dan kehidupan masyarakat;
(*giat3108/progProfesionalismeSDMPolri/SP4/SS3/IKPa*);
 - b) membangun sistem penilaian kompetensi Polri (kompetensi teknis, kompetensi kepemimpinan dan kompetensi etik) yang komprehensif melingkupi perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi guna mendukung "*program manajemen talenta*";
(*giat3108/progProfesionalismeSDMPolri/SP4/SS3/IKPa*);
 - c) optimalisasi Sistem Manajemen Kinerja *online* dengan SIPP guna menerapkan *Merit System* dalam manajemen pembinaan karier dalam rangka

- memberikan kesempatan yang sama dalam berkarya;
(giat3108/progProfesionalismeSDMPolri/SP4/SS3/IKPa);
- d) meningkatkan jumlah assesor sertifikasi kompetensi bidang Satpam dan Polsus;
(giat3100,3108,5076/progProfesionalismeSDMPolri,Harkamtibmas/SP4/SS3/IKPa);
- 6) arah bijak: meningkatkan kesejahteraan SDM Polri melalui layanan kesehatan, perumahan dan keselamatan kerja;
 untuk mewujudkan arah bijak 6, maka terdapat 4 (empat) strategi yang akan dilakukan yaitu:
- a) meningkatkan pelayanan administrasi berkaitan dengan BPJS dan Asuransi Jamkestama bagi anggota Polri dan masyarakat;
(giat3072/progDukma/SP4/SS5/IKPe);
- b) mengoptimalkan pelayanan secara proaktif dalam pemberian tanda kehormatan kepada pegawai pada Polri yang gugur/tewas dalam tugas menumbuhkan budaya melayani yang non diskriminasi dan *user friendly*;
(giat3072,3105/progDukma,progProfesionalismeSDMPolri/SP4/SS5/IKPe);
- c) meningkatkan kualitas pelayanan administrasi pegawai bagi anggota Polri, menumbuhkan budaya melayani yang nondiskriminasi dan *user friendly* termasuk berkaitan dengan ASABRI;
(giat3105/progProfesionalismeSDMPolri/SP4/SS5/IKPe);
- d) melanjutkan peningkatan standar akreditasi rumah sakit Bhayangkara melalui Standar Nasional Akreditasi Rumah Sakit (SNARS);
(giat3072,5062/progDukma/SP4/SS5/IKPe);
- 5) Sasaran Prioritas V “Mengembangkan Almatsus, Perbekalan dan Fasilitas Konstruksi Polri yang Modern dan Memadai sesuai dengan Kebutuhan Organisasi Berbasis *Minimum Essential Police Equipment (MEPE)*” terdiri dari 6 (enam) arah bijak sebagai berikut:
- 1) memenuhi sarana dan prasarana dan Almatsus Polri yang modern guna mendukung peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat;

2) mendorong



- 2) mendorong peran Badan Usaha Milik Negara Industri Strategis (Bumnis) dan industri swasta nasional dalam pemenuhan Almatsus Polri;
- 3) pemenuhan rumah dinas pegawai Polri serta pembangunan fasilitas perkantoran dan mendorong pembangunan rumah dinas termasuk di wilayah perbatasan;
- 4) melanjutkan pengembangan laboratorium forensik di kewilayahan secara bertahap;
- 5) melanjutkan pengembangan Almatsus SCI;
- 6) melanjutkan pembangunan dan menyatukan sistem informasi kepolisian yang terintegrasi;

Dengan penjelasan masing-masing arah bijak sebagai berikut:

- 1) arah bijak: memenuhi sarana dan prasarana dan Almatsus Polri yang modern guna mendukung peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat;
untuk mewujudkan arah bijak 1, maka terdapat 13 (tiga belas) strategi yang akan dilakukan yaitu:
 - a) melanjutkan pembangunan ruang RPK, SPKT di Polda, Polres dan Polsek sesuai dengan SPM yang terintegrasi secara *online*;
(giat5062,3071/progModernisasiAlmatsusSarprasPolri/SP5/SS4/IKPb);
 - b) melanjutkan pemenuhan almatsus Polri yang modern berbasis teknologi informasi guna mendukung penggelaran operasional dalam rangka penanganan penyelidikan, pengindraan, ungkap kasus, pengamanan unjuk rasa, konflik sosial, lawan insurjensi dan pemeliharaan keamanan;
(giat5060,3084/progModernisasiAlmatsusSarprasPolri/SP5/SS4/IKPb);
 - c) melanjutkan pemenuhan peralatan dan materiil registrasi dan identifikasi Fungsi Lalu Lintas yang berbasis teknologi serta melanjutkan pembangunan gedung BPKB dan STNK *online*;
(giat5060,3084,3133/progModernisasiAlmatsusSarprasPolri,progHarkamtibmas/SP5/SS4/IKPb);
 - d) melanjutkan pengembangan Pembangunan Indonesia *Safety Driving Center*;

(giat



(giat5060,5062,3133/progModernisasiAlmatsusSarprasPolri,progHarkamtibmas/SP5/SS4/IKPb);

- e) melanjutkan dan meningkatkan pembangunan RTMC/TMC;
(giat5060,5062,3133/progModernisasiAlmatsusSarprasPolri2,progHarkamtibmas/SP5/SS4/IKPb);
- f) melanjutkan pembangunan/pemasangan *ETLE* guna menegakkan hukum secara transparan di jalan raya;
(giat5060,3084,3133/progModernisasiAlmatsusSarprasPolri,progHarkamtibmas/SP5/SS4/IKPb);
- g) pembangunan dan meningkatkan Faskes dalam rangka pelayanan kesehatan, baik di tingkat pusat maupun wilayah untuk memberikan layanan kesehatan yang prima kepada anggota dan PNS Polri serta masyarakat umum;
(giat5060,5062/progModernisasiAlmatsusSarprasPolri/SP5/SS4/ IKPb);
- h) melanjutkan Litbang guna pembuatan *prototype* peralatan Polri berbasis teknologi dan inovasi teknologi kepolisian terkini;
(giat5067,5060,3084/progDukma,progModernisasiAlmatsusSarprasPolri/SP5/SS4/IKPb);
- i) membangun dan mengembangkan sistem komunikasi di wilayah perbatasan, Pulau Terluar dan wilayah rawan bencana;
(giat5055,5060,3084,/progDukma,progModernisasiAlmatsusSarprasPolri/SP5/SS4/IKPb);
- j) melanjutkan pemetaan terhadap rencana kebutuhan Alpalkam dan Almatsus Polri terkini (Min dan Maks);
(giat5060,5051/progModernisasiAlmatsusSarprasPolri/SP5/SS4/IKPb);
- k) pemenuhan peralatan penanganan awal Bencana, Karhutla dan Banjir sesuai dengan karakteristik wilayah dalam rangka pertolongan pertama kepada masyarakat;
(giat5060,3084/progModernisasiSarprasPolri/SP5/SS4/IKPb);

l) pemenuhan



- l) pemenuhan Almatsus Polri berbasis kendaraan listrik guna mendukung program pemerintah di bidang energi terbarukan;
(giat3084/progModernisasiSarprasPolri/SP5/SS4/IKPb);
- m) pemenuhan almatsus/alpalkam untuk digunakan dalam pengamanan nasional/internasional 2025, Perbatasan dan Destinasi Wisata;
(giat3084/progModernisasiSarprasPolri/SP5/SS4/IKPb);
- 2) arah bijak: mendorong peran Badan Usaha Milik Negara Industri Strategis (Bumnis) dan industri swasta nasional dalam pemenuhan Almatsus Polri; untuk mewujudkan arah bijak 2, maka terdapat 2 (dua) strategi yang akan dilakukan yaitu:
 - a) melanjutkan kerja sama dengan BUMNIS dan Industri Swasta Nasional (ISN) dalam pembuatan *prototype*, berikut melakukan Standardisasi dan Sertifikasi Alpalkam dan Almatsus Polri;
(giat5060/progModernisasiAlmatsusSarprasPolri/SP5/SS4/IKPb)
 - b) mendorong penggunaan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN) dalam setiap pelaksanaan Pengadaan Almatsus dan Alsus Polri;
(giat4341/progModernisasiAlmasusSarprasPolri/SP5/SS4/IKPb);
- 3) arah bijak: pemenuhan rumah dinas pegawai Polri serta pembangunan fasilitas perkantoran dan mendorong pembangunan rumah dinas termasuk di wilayah perbatasan; untuk mewujudkan arah bijak 3, maka terdapat 4 (empat) strategi yang akan dilakukan yaitu:
 - a) melanjutkan usulan pembangunan fasilitas kantor Polri di IKN dan rencana pembangunan Mako Polda dan Polres/Polrestabes;
(giat5062/progModernisasiAlmatsusSarprasPolri/SP5/SS4/IKPb)
 - b) melanjutkan pembangunan fasilitas pergudangan, rumah dinas, flat dan rusun bagi personel Polri;
(giat5062/progModernisasiAlmatsusSarprasPolri/SP5/SS4/IKPb)
 - c) melanjutkan pembangunan rumah sakit atau layanan kesehatan lainnya

(poliklinik)



(poliklinik) yang dekat dengan personel dan masyarakat guna mendukung “Reformasi Sistem Kesehatan Nasional”;

(giat5062/progModernisasiAlmatsusSarprasPolri/SP5/SS4/IKPb)

- d) melanjutkan pembangunan fasilitas perkantoran dan Rumdin guna *mempercepat* pembangunan di wilayah perbatasan secara selektif prioritas dan berkelanjutan.

(giat5062/progModernisasiAlmatsusSarprasPolri/SP5/SS4/IKPb)

- 4) arah bijak: melanjutkan pengembangan laboratorium forensik di kewilayahan secara bertahap;

untuk mewujudkan arah bijak 4, maka terdapat strategi yang akan dilakukan yaitu: melanjutkan pembangunan pengembangan laboratorium forensik beserta rumah dinas di tingkat kewilayahan dalam rangka mendukung percepatan pengungkapan kasus tindak pidana;

(giat5062/progModernisasiAlmatsusSarprasPolri/SP5/SS4/IKPb);

- 5) arah bijak: melanjutkan pengembangan Almatsus SCI;

untuk mewujudkan arah bijak 5, maka terdapat strategi yang akan dilakukan yaitu: melanjutkan pemenuhan peralatan laboratorium forensik dan sidik jari dengan teknologi terkini;

(giat3084/progModernisasiAlmatsusSarprasPolri/SP5/SS4/IKPb);

arah bijak: membangun dan menyatukan sistem informasi kepolisian yang terintegrasi;

untuk mewujudkan arah bijak 6, maka terdapat 3 (tiga) strategi yang akan dilakukan yaitu:

- a) melanjutkan pengadaan sistem informasi kepolisian secara bertahap yang terintegrasi;

(giat3084/progModernisasiAlmatsusSarprasPolri/SP5/SS4/IKPb);

- b) melanjutkan penataan infrastruktur layanan darurat/*hotline* kepolisian secara bertahap dengan nomor tunggal dalam rangka merespons dengan cepat pengaduan masyarakat;

(giat



*(giat5055,5062/progDukma,progModernisasiAlmatsusSarpras
 Polri/SP5/SS4/IKPb);*

- c) mengembangkan teknologi kepolisian dan sistem informasi berdasarkan hasil penelitian;

*(giat3084,5067/progModernisasiAlmatsusSarprasPolri,progDukma/SP5/SS4/IKP
 b);*

- 6) Sasaran Prioritas VI “Meningkatkan Budaya Integritas, Kejujuran dan Kehormatan pada Setiap Pelaksanaan Tugas Kepolisian” terdiri dari 6 (enam) arah bijak sebagai berikut:
- 1) melanjutkan penguatan penanganan publik komplain secara efektif dan terpercaya berbasis *online*;
 - 2) melanjutkan dan mengoptimalkan kegiatan Saber Pungli, bahaya perjudian dan TPPO serta Penyelundupan barang ilegal di lingkungan internal Polri;
 - 3) melanjutkan dan meningkatkan kegiatan pencegahan korupsi di internal Polri;
 - 4) meningkatkan tata kelola manajemen kinerja, perencanaan, penganggaran dan keuangan Polri yang transparan dan akuntabel;
 - 5) melanjutkan penataan kelembagaan dan tata laksana Polres, Polsek dan Polsubsektor serta penguatan struktur organisasi Polri agar lebih efektif dan efisien;
 - 6) meningkatkan kualitas pelayanan publik Polri melalui pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Polri guna meraih berpredikat WBK dan WBBM dan peningkatan jumlah capaian Satker/Satwil Zona Integritas berpredikat WBK dan WBBM.

Dengan penjelasan masing-masing arah bijak sebagai berikut:

- 1) arah bijak: melanjutkan penguatan penanganan publik komplain secara efektif dan terpercaya berbasis *online*;
 untuk mewujudkan arah bijak 1, maka terdapat 3 (tiga) strategi yang akan dilakukan yaitu:
 - a) mengoptimalkan klarifikasi penanganan pengaduan masyarakat secara terpadu yang berbasis TI;

(giat3091,3089/progDukma/SP6/SS5/IKPg);

- b) mengoptimalkan sistem penanganan pengaduan masyarakat secara *online*;
(giat3091,3089/progDukma/SP6/SS5/IKPg);
 - c) percepatan penyelesaian pengaduan masyarakat yang berasal dari pengawas *eksternal* dengan berbasis TI;
(giat3091,3089/progDukma/SP6/SS5/IKPg);
- 2) arah bijak: melanjutkan dan mengoptimalkan kegiatan Saber Pungli di lingkungan internal Polri;
- untuk mewujudkan arah bijak 2, maka terdapat 6 (enam) strategi yang akan dilakukan yaitu:
- a) melanjutkan dan meningkatkan sinergisitas dari Pokja Satgas Saber Pungli, Pokja UPP K/L dan Pokja UPP Pemda dalam memberantas pungli serta pelaporan yang terintegrasi;
(giat3091/progDukma/SP6/SS5/IKPg);
 - b) mendorong pelayanan publik secara *online* yang bersih transparan dan akuntabel berbasis *Medsos/Whatsapp*;
(giat3091,3149/progDukma/SP6/SS5/IKPg);
 - c) mengoptimalkan kerja sama dengan pihak-pihak terkait dalam mencegah Pungli;
(giat3091/progDukma/SP6/SS5/IKPg);
 - d) melanjutkan pelaksanaan pengamanan (kegiatan, personel, Baket) terkait rekrutmen pendidikan pembentukan: Bintara, Akpol dan SIPSS;
(giat3089,3090/progDukma/SP6/SS5/IKPg);
 - e) melanjutkan pelaksanaan pengamanan kegiatan personel, Baket terkait Pendidikan Pengembangan: SIP, Sespima, Sespimmen/ PKN Tingkat 2, Sespimti/Lemhanas dan PKN Tingkat 1;
(giat3089,3090/progDukma/SP6/SS5/IKPg);
 - f) melanjutkan pelaksanaan kegiatan “*operasi bersih*” diinternal dan di sentra pelayanan publik Polri baik terkait penanganan perkara pidana dan

pelayanan



pelayanan publik (SIM, STNK, BPKB, SKCK);

(giat3089,3090/progDukma/SP6/SS5/IKPg);

- 3) arah bijak: melanjutkan dan meningkatkan kegiatan pencegahan korupsi di internal Polri;

untuk mewujudkan arah bijak 3, maka terdapat 2 (dua) strategi yang akan dilakukan yaitu:

- a) meningkatkan peran serta seluruh anggota sebagai pengawas dan pemberi informasi terkait dugaan korupsi di tubuh Polri melalui Aplikasi *Whistle Blower System (WBS)*. Sinergi dan kolaborasi dengan lembaga pemeriksa eksternal serta aparat penegak hukum lainnya dalam upaya pencegahan korupsi;
(giat3089,3090,3091/progDukma/SP6/SS5/IKPd);

- b) melanjutkan sosialisasi “Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2017” tentang Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia, serta Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pengendalian Gratifikasi pada Kepolisian Negara Republik Indonesia;

(giat3091/progDukma/SP6/SS5/IKPd);

- 4) arah bijak: meningkatkan tata kelola manajemen kinerja, perencanaan, penganggaran dan keuangan Polri yang transparan dan akuntabel; untuk mewujudkan arah bijak 4, maka terdapat 5 (lima) strategi yang akan dilakukan yaitu:

- a) meningkatkan pelaksanaan kegiatan monitoring dan evaluasi dalam perencanaan dan penganggaran Satker agar lebih efektif dan efisien;

(giat4339/progDukma/SP6/SS5/IKPf);

- b) melanjutkan, meningkatkan dan mengembangkan sinergisitas dalam e-Jakstra guna menyusun produk perencanaan dan penganggaran Polri (Domren Kapolri, Rancangan Renja Polri dan Renja Polri) guna menyelaraskan pembangunan di lingkungan Polri agar semakin berkualitas;

(giat5051/progDukma/SP6/SS5/IKPf);

c) meningkatkan



- c) meningkatkan koordinasi, sinergi serta komitmen antara fungsi pengawasan, fungsi perencanaan, fungsi Logistik, fungsi Keuangan dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) selaku penanggung jawab tata kelola keuangan tingkat Satker;
(giat3068,3091,4339,5054/progDukma/SP6/SS5/IKPf);
 - d) melaksanakan dan meningkatkan kegiatan monitoring dan evaluasi terhadap capaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Polri Semester dan Tahunan;
(giat3068,4339,3091/progDukma);
 - e) melaksanakan analisis dan evaluasi kinerja dan anggaran di bidang pembinaan dan operasional;
(giat3068,4339,3091,5054/progDukma/SP6/SS5/IKPf);
- 5) arah bijak: melanjutkan penataan kelembagaan dan tata laksana Polres, Polsek dan Polsubsektor serta penguatan struktur organisasi Polri agar lebih efektif dan efisien;
- untuk mewujudkan arah bijak 5, maka terdapat 3 (tiga) strategi yang akan dilakukan yaitu:
- a) melanjutkan dan melaksanakan Monev pemenuhan satu Kecamatan satu Polsek secara bertahap serta mengubah kewenangan Polsek hanya untuk Harkamtibmas pada daerah tertentu (tidak melakukan penyidikan);
(giat5052/progDukma/SP6/SS5/IKPd);
 - b) melanjutkan penguatan organisasi satuan kewilayahan sesuai dengan situasi Kamtibmas dan perkembangannya termasuk mendukung pemekaran wilayah Papua dan Papua Barat;
(giat5052/progDukma/SP6/SS5/IKPd);
 - c) melanjutkan dan penyempurnaan peraturan tentang SOTK tingkat Mabes Polri, Polda, Polres, Polsek dan Polsubsektor serta menyusun kesiapan terbentuknya Satwil baru guna mendukung IKN;
(giat5052/progDukma/SP6/SS5/IKPd);

6) arah



- 6) arah bijak: meningkatkan kualitas pelayanan publik Polri melalui pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Polri guna meraih berpredikat WBK dan WBBM dan peningkatan jumlah capaian Satker/Satwil Zona Integritas berpredikat WBK dan WBBM;

untuk mewujudkan arah bijak 6, maka terdapat 5 (lima) strategi yang akan dilakukan yaitu:

- a) melaksanakan bimbingan kepada unit penyelenggara pelayanan publik di seluruh unit kerja Polri untuk memedomani kebijakan Forum Konsultasi Publik (FKP), sebagai wadah menampung aspirasi dari seluruh masyarakat/*stakeholder* terkait kebijakan penyelenggaraan layanan publik yang diberikan oleh Polri, dalam rangka evaluasi kebijakan layanan guna mewujudkan kebijakan dan penyelenggaraan pelayanan publik yang efektif, efisien berdasarkan aturan yang berlaku (terukur) dan sesuai tuntutan kebutuhan masyarakat;

(giat5053/progDukma/SP6/SS5/IKPd);

- b) melanjutkan kegiatan asistensi penyelenggaraan pelayanan publik di seluruh unit pelayanan publik Polres/Polresta/ Polrestabes dan Polres Metro, sesuai dengan komponen standar pelayanan di dalam UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, dalam rangka perbaikan unit pelayanan publik dan peningkatan indeks pelayanan publik Polri;

(giat5053/progDukmaSP6/SS5/IKPd);

- c) melaksanakan bimbingan dalam keikutsertaan inovasi-inovasi Polri yang memenuhi syarat ke dalam ajang Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KIPP), agar lebih banyak peserta dari Polri yang berpartisipasi, sehingga lebih besar peluang untuk memperoleh kategori TOP 99/45 inovasi pelayanan publik;

(giat5053/progDukma/SP6/SS5/IKPd);

- d) melanjutkan, mempertahankan dan meningkatkan capaian Satker/Satwil Zona Integritas yang sudah berpredikat WBK dan WBBM dan peningkatan jumlah capaian Satker/Satwil Zona Integritas berpredikat WBK dan WBBM;

(giat5053/progDukma/SP6/SS5/IKPd);

e) melanjutkan



- e) melanjutkan pelaksanaan pengukuran kinerja dengan Indeks Tata Kelola (ITK) Polri berbasis *web* dan *mobile* secara *online* (ITK-O) tingkat Polres Metro/Polrestabes/Polresta/Polres dan Satker Polda;
(*giat5053/progDukma/SP6/SS5/IKPd*).

2. Arah kebijakan Puskeu Polri.

Puskeu Polri memiliki peran dalam mendukung atau mewujudkan Sasaran Prioritas Polri yang ke-IV **“Mewujudkan Pengelolaan SDM yang Modern dan Transparan serta Pembangunan Kapasitas SDM yang Sehat, Cerdas, Berintegritas dan Profesional”** dengan arah bijak meningkatkan kualitas hasil lulusan pendidikan Diklat Polri guna mewujudkan SDM Polri yang siap pakai di era digital dan kemajuan teknologi untuk mewujudkan arah bijak tersebut, maka peran Puskeu Polri adalah meningkatkan kualitas dan kapabilitas para Verifikator dan APIP di lingkungan Polri dalam upaya tertib administrasi keuangan serta mencegah terjadinya korupsi dan yang ke-VI **“Meningkatkan Budaya Integritas, Kejujuran dan Kehormatan pada Setiap Pelaksanaan Tugas Kepolisian”**, yang akan dicapai melalui arah kebijakan meningkatkan tata kelola manajemen kinerja, perencanaan, penganggaran dan keuangan Polri yang transparan dan akuntabel. Adapun beberapa strategi yang dilakukan yaitu meningkatkan koordinasi, sinergi serta komitmen antara fungsi pengawasan, fungsi perencanaan, fungsi Logistik, fungsi Keuangan dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) selaku penanggung jawab tata kelola keuangan tingkat Satker, melaksanakan dan meningkatkan kegiatan monitoring dan evaluasi terhadap capaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Polri Semester dan Tahunan, dan melaksanakan analisis dan evaluasi kinerja dan anggaran di bidang pembinaan dan operasional.

Maka Arah Kebijakan dan Strategi yang dilakukan oleh Puskeu Polri, diantaranya:

- a. Sasaran Prioritas **“Mewujudkan pengelolaan keuangan Polri dengan komitmen kerja Puskeu Polri yang akuntabel, efektif, partisipatif, kolaboratif lintas Satker, dan berbasis teknologi”**, dicapai dengan arah kebijakan, yaitu meningkatkan kualitas Laporan Keuangan Polri. Strategi yang dilakukan untuk mendukung arah kebijakan tersebut, diantaranya:

1) Menyusun



- 1) Menyusun laporan keuangan yang berpedoman pada SAP;
 - 2) Menyelenggarakan pemantauan penerapan rekening *Virtual Account* oleh bendahara penerima Satker;
 - 3) Mengoptimalkan kegiatan rekonsiliasi data keuangan (verifikasi Perwabku Belanja Barang dan Modal Tingkat Satker Mabes Polri);
 - 4) meningkatkan koordinasi, sinergi serta komitmen antara fungsi pengawasan, fungsi perencanaan, fungsi Logistik, fungsi Keuangan dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).
- b. Sasaran Prioritas kedua **“Mewujudkan pembinaan, pengendalian, pembiayaan, serta verifikasi terhadap pengelolaan keuangan Polri yang unggul dan terintegrasi serta berbasis teknologi”**. Arah kebijakan yang dilakukan yaitu:
- 1) Peningkatan kompetensi SDM keuangan Polri. Untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut, maka strategi yang dapat dilakukan Puskeu adalah menyelenggarakan kegiatan pendidikan dan pelatihan bagi SDM keuangan Polri;
 - 2) Peningkatan kualitas penyelenggaraan administrasi pembiayaan di lingkungan Polri. Untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut, maka strategi yang dapat dilakukan Puskeu adalah:
 - a) Menyelenggarakan pelayanan pembiayaan (internal/eksternal) tanpa tatap muka dalam rangka ZI atau WBBM;
 - b) Membangun sistem pelayanan pembiayaan secara digitalisasi atau *online system*;
 - c) Membangun sistem *block chain* dalam rangka penyelenggaraan laporan pembiayaan.
 - 3) Peningkatan pengendalian dan pengawasan terhadap pengelolaan keuangan. Strategi yang dilakukan yaitu:
 - a) melaksanakan dan meningkatkan kegiatan monitoring dan evaluasi terhadap capaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Polri Semester dan Tahunan.
 - b) melaksanakan analisis dan evaluasi kinerja dan anggaran di bidang pembinaan dan operasional.

c. Sasaran



- c. Sasaran Prioritas ketiga **“Mewujudkan organisasi, tata kelola, dan sistem manajemen administrasi keuangan Polri yang terintegrasi, terbuka, berkelanjutan, dan berbasis TI”** dilakukan melalui arah kebijakan sebagai berikut
- 1) Penguatan peran kelembagaan Puskeu Polri baik di pusat maupun wilayah. Untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut, maka strategi yang dapat dilakukan Puskeu adalah:
 - a) Menyampaikan data jumlah anggaran tunjangan yang akan disalurkan kepada Bidang Pengendalian Puskeu;
 - b) Menyelenggarakan pembinaan penyusunan laporan keuangan satker dalam rangka tersajinya laporan keuangan wilayah melalui kegiatan rekonsiliasi;
 - c) Memperkuat peran dan fungsi Bidkeu sebagai pembina bidang keuangan di satker kewilayahan;
 - d) Menyelenggarakan pembinaan dan peningkatan kemampuan pejabat pengelola keuangan Satker tingkat wilayah Mabes Polri.
 - 2) Peningkatan tata kelola manajemen kinerja, perencanaan, penganggaran dan keuangan Polri yang transparan dan akuntabel. Untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut, maka strategi yang dapat dilakukan adalah:
 - a) Mengoptimalkan fungsi sistem informasi keuangan *online* dan aplikasi Puskeu;
 - b) Mengintegrasikan sistem informasi dan aplikasi Puskeu dengan sistem informasi milik stakeholder terkait;
 - c) Menyusun dan memperbaharui SOP di lingkungan Puskeu berdasarkan dokumen Proses Bisnis;
 - d) Menyelenggarakan analisis dan evaluasi terhadap dokumen Proses Bisnis Puskeu secara rutin.

Penentuan Arah Kebijakan dan Strategi yang disampaikan selaras dalam mendukung Rancangan awal Rencana Strategi (Renstra) Satker Puskeu Polri Tahun 2025-2029 ditetapkan pentahapan kebijakan pada Tahun 2025, yaitu:

“Mengoptimalkan



“Mengoptimalkan hasil evaluasi menyeluruh terhadap implementasi pengelolaan keuangan yang telah berjalan selama (5) lima tahun sebelumnya. Evaluasi ini bertujuan untuk menilai efektivitas strategi yang diterapkan, mengidentifikasi kendala yang dihadapi, serta menetapkan langkah-langkah penyesuaian strategis untuk memperbaiki kelemahan yang ada. Adapun upaya konkret pada Tahun 2025, memfokuskan peningkatan kapasitas SDM dalam pengelolaan keuangan Polri, adopsi teknologi baru dalam pengelolaan administrasi keuangan, serta implementasi Standar Operasional Prosedur (SOP) yang lebih ketat dan transparan yang mengadopsi pendekatan berbasis kinerja dalam penyusunan anggaran untuk memastikan bahwa setiap rupiah yang dianggarkan dapat memberikan hasil yang maksimal dan berdampak langsung pada peningkatan kinerja kepolisian.

IV. Program, Kegiatan dan Usulan Pagu Anggaran T.A. 2025.

1. Program dan Kegiatan Puskeu Polri.

a. Program Profesionalisme SDM Polri.

1) Tujuan

Mewujudkan aparatur Polri yang profesional baik dari segi kualitas maupun kuantitas dan memiliki kompetensi sesuai dengan bidangnya melalui penyelenggaraan pendidikan Polri sehingga mampu mengemban tugas Polri secara profesional dan proporsional.

2) Kegiatan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan Polri.

b. Program Modernisasi Almitsus dan Sarana Prasarana.

1) Tujuan

Modernisasi Almitsus dan sarana prasarana Polri guna mendukung pelaksanaan tugas fungsi bidang pembinaan dan operasional.

2) Kegiatan

2) Kegiatan

a) Pengembangan peralatan Polri:

- (1) pengembangan peralatan TIK;
- (2) peralatan sumber Pinjaman Luar Negeri;
- (3) peralatan sumber Pinjaman Dalam Negeri.

b) Dukungan manajemen dan tehnik sarpras berupa penyelenggaraan operasional dan pemeliharaan perkantoran yang terdiri dari:

- (1) operasi DOB dan IKN;
- (2) perawatan kendaraan bermotor roda 4;
- (3) perawatan kendaraan bermotor roda 2;
- (4) pemeliharaan peralatan kantor.

c. Program Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat.

1) Tujuan

Terpeliharanya Kamtibmas melalui peningkatan kemampuan manajemen operasional dan informasi kepolisian serta kerja sama lintas sektoral yang fokus pada pelaksanaan tugas fungsi deteksi aksi, preemtif dan preventif.

2) Kegiatan

Dukungan manajemen dan teknis pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, yaitu:

- a) operasi DOB dan IKN;
- b) Operasional Kepolisian Direktif Kapolri.

d. Program Dukungan Manajemen:

1) Tujuan:

Terwujudnya *good governance* dan *clean government* melalui peningkatan koordinasi pelaksanaan tugas; pembinaan kemampuan manajemen dan informasi Kepolisian; sinkronisasi perencanaan kebijakan program dan anggaran dan integrasi serta kerja sama lintas sektor.

2) Kegiatan



2) Kegiatan:

- a) Pelayanan Administrasi Keuangan Polri terdiri dari :
- (1) honorarium sai sakpa simak smap pengelola keuangan;
 - (2) pembinaan fungsi-fungsi;
 - (3) dukungan Operasional Satker;
 - (4) pengadaan makanan/miniman penambah daya tahan tubuh;
 - (5) rapat-rapat koordinasi/kerja/dinas/pimpinan pokja/konsultasi;
 - (6) penyusunan Program, Anggaran dan Renja;
 - (7) penyusunan RKA-K/L dan DIPA;
 - (8) penyusunan dan evaluasi LKIP;
 - (9) penyusunan Perjanjian Kinerja;
 - (10) anggaran WBK-WBBM;
 - (10) penyelenggaraan Sistem Akuntansi Pemerintah (SAP);
 - (11) pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan;
 - (12) peningkatan kemampuan personel Satker;
 - (13) evaluasi/laporan kegiatan.
- b) Dukungan pelayanan internal Perkantoran Polri yang terdiri dari :
- (1) dukungan operasional pertahanan dan keamanan;
 - (a) pembinaan tradisi Polri;
 - (b) honorarium;
 - (c) pembinaan fungsi-fungsi;
 - (d) dukungan operasional Satker;
 - (e) evaluasi/laporan kegiatan;
 - (f) anggaran WBK-WBBM.
 - (2) pembayaran gaji dan tunjangan;
 - (3) penyelenggaraan operasional dan pemeliharaan perkantoran berupa pengadaan peralatan/perlengkapan kantor.

2. Pagu



2. Pagu Anggaran Puskeu Polri Tahun Anggaran 2025

Pagu Anggaran Satker Puskeu Polri T.A. 2025 sebesar Rp26.134.629.218.000,- dengan rincian sebagai berikut:

- a. Program Profesionalisme SDM Polri Rp3.814.119.000,-;
- b. Program Modernisasi Almatsus dan Sarana Prasarana Polri Rp4.102.260.340.000,- terdiri dari:
 - 1) Pemenuhan Almatsus sebesar Rp3.683.177.129.000,- terdiri dari:
 - (a) pengembangan peralatan TIK Rp34.999.120.000,-;
 - (b) pinjaman Luar Negeri (PLN) Rp3.473.425.700.000,-;
 - (c) pinjaman Dalam Negeri (PDN) Rp174.752.309.000,-.
 - 2) Dukungan manajemen teknis dan Sarpras Rp419.083.211.000,- terdiri dari:
 - (a) operasi DOB dan IKN Rp417.906.131.000,-;
 - (b) perawatan kendaraan bermotor roda 4 Rp883.380.000,-;
 - (c) perawatan kendaraan bermotor roda 2 Rp128.960.000,-;
 - (d) pemeliharaan peralatan kantor Rp164.760.000,-.
- c. Program Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Dukungan Manajemen dan Teknis Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Rp1.110.334.989.000 terdiri dari:
 - 1) operasi DOB dan IKN Rp475.030.330.000,-;
 - 2) operasi kepolisian berdasarkan Direktif Kapolri Rp635.304.659.000,-;
- d. Program Dukungan Manajemen Rp20.918.219.770.000,- terdiri dari :
 - 1) Pelayanan Administrasi Keuangan Polri terdiri dari :
 - (a) honorarium sai sakpa simak smap pengelola keuangan Rp196.992.000,-;
 - (b) pembinaan fungsi-fungsi Rp33.367.000,-;

(c) dukungan



- (c) dukungan Operasional Satker Rp2.992.248.000,-;
 - (d) pengadaan makanan/miniman penambah daya tahan tubuh
Rp367.840.000,-;
 - (e) rapat-rapat koordinasi/kerja/dinas/pimpinan pokja/konsultasi
Rp41.400.000,-;
 - (f) penyusunan program, anggaran dan Renja Rp14.745.000,-;
 - (g) penyusunan RKA-K/L DIPA Rp39.215.000,-;
 - (h) penyusunan dan evaluasi LKIP Rp16.033.000,-;
 - (i) penyusunan Perjanjian Kinerja Rp8.100.000,-;
 - (j) anggaran WBK-WBBM Rp258.900.000,-;
 - (k) penyelenggaraan Sistem Akuntansi Pemerintah (SAP)
Rp4.974.462.000,-;
 - (l) pembinaan administrasi dan pengelolaan keuangan Rp685.618.000,-;
 - (m) peningkatan kemampuan personel satker Rp141.894.000;
 - (n) evaluasi/laporan kegiatan Rp1.553.504.000,-.
- 2) Dukungan pelayanan internal Perkantoran Polri yang terdiri dari:
- (a) pembinaan tradisi Polri Rp6.000.000.000,-;
 - (b) honorarium Rp3.600.000,-;
 - (c) pembinaan fungsi-fungsi Rp900.075.000,-;
 - (d) dukungan Operasional Satker Rp33.932.000,-;
 - (e) evaluasi/laporan kegiatan Rp614.382.000,-.
 - (f) anggaran WBK-WBBM Rp251.645.000,-;
 - (g) pembayaran gaji dan tunjangan Rp20.898.895.738.000,-;
 - (h) penyelenggaraan operasional dan pemeliharaan perkantoran berupa
pengadaan peralatan/perlengkapan kantor Rp196.080.000,-.

KEGIATAN



KEGIATAN PRIORITAS PAGU ANGGARAN T.A. 2025*(Dalam ribuan Rupiah)*

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/	SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	ALOKASI (Rp)
WA	Program Dukungan Manajemen.	Terselenggaranya dukungan manajemen kepada internal Polri yang memenuhi standar pelayanan.			
3068	Pelayanan Administrasi Keuangan Polri	Terwujudnya pengelolaan keuangan Polri yang modern, efektif, dan akuntabel.	Opini BPK RI atas Laporan Keuangan Polri.	WTP	Rp3.284.478
			Persentase Laporan Keuangan Satker Jajaran Mabes dan Wilayah yang Tepat Saji.	92%	Rp1.689.984
		Terselenggaranya penjaminan akurasi dan kualitas hasil verifikasi penyajian pertanggungjawaban pengelolaan keuangan secara profesional.	Jumlah NPHPW yang diterbitkan di lingkungan Polri.	280 NPHPW	Rp288.045
			Persentase Efektivitas Penerapan PIPK pada Satker di lingkungan Polri yang memperoleh penilaian Efektif atau Efektif Dengan Pengecualian.	15%	Rp760.632
		Terwujudnya kesesuaian administrasi pembiayaan yang modern, transparan, dan akuntabel.	Persentase Penyelesaian Tranfer Keluar Transfer masuk (TKTM).	100%	Rp109.182

KODE



(Dalam ribuan Rupiah)

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/	SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	ALOKASI (Rp)
		Terwujudnya pengawasan dan pengendalian terhadap pengelolaan Keuangan Satker Mabes dan Wilayah.	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Polri.	92,25	Rp327.337
			Persentase Jumlah Satker Polri dengan Nilai IKPA $\geq$ 93,75.	80%	Rp433.659
		Tata kelola Puskeu Polri yang bersih, transparan, dan akuntabel.	Nilai Akuntabilitas Kinerja (AKIP) Puskeu Polri.	80,1 (A)	Rp63.379
			Nilai Kinerja Anggaran (NKA) Puskeu Polri.	76,5	Rp15.697
			Presentase SDM Fungsi Keuangan yang Memiliki Sertifikasi Kompetensi Keuangan.	60%	Rp3.814.119
			Indeks Profesionalitas SDM Puskeu Polri.	71	Rp45.825
			Jumlah Pelaksanaan Anev Terhadap Dokumen Pembinaan Fungsi di Lingkungan Puskeu Polri.	4 DOKUMEN	Rp79.778

- V. Demikian Rencana Kerja Pusat Keuangan Polri T.A. 2025 disusun untuk dijadikan pedoman dalam pelaksanaan kegiatan T.A. 2025.

Jakarta, 13 Desember 2024
KEPALA PUSAT KEUANGAN POLRI

Ditandatangani secara elektronik oleh:

 **LUKAS AKBAR ABRIARI, S.I.K., M.H.**
BRIGADIR JENDERAL POLISI

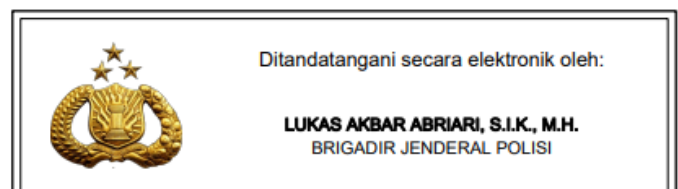


RENCANA KERJA TAHUNAN (RKT) PUSKEU POLRI T.A. 2025

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2025
1	Terwujudnya pengelolaan keuangan Polri yang modern, efektif, dan akuntabel.	Opini BPK RI atas Laporan Keuangan.	WTP
		Persentase Laporan Keuangan Satker Jajaran Mabes dan Wilayah yang Tepat Saji.	92%
2	Terselenggaranya penjaminan akurasi dan kualitas hasil verifikasi penyajian pertanggungjawaban pengelolaan keuangan secara profesional.	Jumlah NPHPW yang diterbitkan di lingkungan Polri.	280 NPHPW
		Persentase Efektivitas Penerapan PIPK pada Satker di lingkungan Polri yang memperoleh penilaian Efektif atau Efektif Dengan Pengecualian.	15%
3	Terwujudnya kesesuaian administrasi pembiayaan yang modern, transparan, dan akuntabel.	Persentase Penyelesaian Tranfer Keluar Transfer masuk (TKTM).	100%
4	Terwujudnya pengawasan dan pengendalian terhadap pengelolaan Keuangan Satker Mabes dan Wilayah.	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Polri.	95,25
		Persentase Jumlah Satker Polri dengan Nilai IKPA $\geq 93,75$	80%
5	Tata kelola Puskeu Polri yang bersih, transparan, dan akuntabel.	Nilai Akuntabilitas Kinerja (AKIP) Puskeu Polri.	80,1 (A)
		Nilai Kinerja Anggaran (NKA) Puskeu Polri.	76,5
		Presentase SDM Fungsi Keuangan yang Memiliki Sertifikasi Kompetensi Keuangan.	60%
		Indeks Profesionalitas SDM Puskeu Polri.	71
		Jumlah Pelaksanaan Anev Terhadap Dokumen Pembinaan Fungsi di Lingkungan Puskeu Polri.	4 DOKUMEN

Jakarta, 13 Desember 2024

KEPALA PUSAT KEUANGAN POLRI





APLIKASI RENCANA KERJA PUSAT KEUANGAN POLRI T.A. 2025



Jakarta, 13 Desember 2024



FORMULIR 2
RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA (RENJA-KL)
TAHUN ANGGARAN 2025

I. UMUM

1. Nama Kementerian/Lembaga : KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
2. Nama Unit Organisasi : Pusat Keuangan Polri
3. Misi Unit Organisasi :

No	Misi
01	Memperkuat pembinaan fungsi keuangan Polri di pusat sampai ke wilayah;
02	Menjamin penyelenggaraan pengelolaan keuangan Polri yang transparan dan akuntabel;
03	Memperkuat sistem manajemen pusat keuangan yang terintegrasi dan terpercaya.

4. Sasaran Strategis :

No	Sasaran Strategi
01	Terselenggaranya pembinaan, pengendalian, serta verifikasi terhadap pengelolaan keuangan Polri yang modern dan unggul
02	Terselenggaranya pengelolaan keuangan Polri yang transparan dan akuntabel
03	Kelembagaan yang akuntabel dan SDM yang presisi

5. Kode Program : 060.01.BD
6. Nama Program : Program Profesionalisme SDM Polri
7. Pendanaan (Ribu Rupiah)

Pendanaan	Alokasi Tahun 2024	Pagu Anggaran Tahun 2025	Prakiraan Kebutuhan	
			Tahun 2024	Tahun 2025
1. Rupiah	3.740.405	3.814.119	3.740.405	3.814.119
a. Pendamping	-	-	-	-
b. Non Pendamping	3.740.405	3.814.119	3.740.405	3.814.119
2. PHLN dan PDN	-	-	-	-
JUMLAH	3.740.405	3.814.119	3.740.405	3.814.119

II. HASIL/OUTCOME DAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Hasil/Outcome	Indikator Kinerja Utama (IKU)
01 Mewujudkan aparaturnya Polri yang profesional baik dari segi kualitas maupun kuantitas dan memiliki kompetensi sesuai dengan bidang tugasnya secara profesional dan proporsional.	01 Standar pelayanan pendidikan dan pelatihan Polri



III. KEGIATAN DAN SUMBER PENDANAAN

A. INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK) DAN TARGET

(05) Program Profesionalisme SDM Polri									
Kode	Nama Kegiatan	Sasaran Kegiatan / Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target 2024	Prakiraan Target			Prioritas	Dukungan (PPP/ARG)	Penanggung Jawab
				2024	2025	Satuan			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(8)	(9)	(10)	(11)
3100.EBC	Penyelenggaraan Pendidikan dan Latihan Polri	011 Pelatihan	434	434	453	OG	0	TIDAK	KAPUSKEU

Keterangan :

Kolom (9) : N = Prioritas Nasional, K/L = Prioritas Kementerian/Lembaga, B = Prioritas Bidang; 0 = Bukan Prioritas

Kolom (10) : PPP = Public Private Partnership ; ARG = Anggaran Responsif Gender

B. SUMBER PENDANAAN

(05) Program Profesionalisme SDM Polri

(Ribu Rupiah)

Kode	Kegiatan/Sasaran Kegiatan/IKK/Output	Jenis Output	Alokasi 2024	Pagu Anggaran Tahun 2025				Prakiraan Kebutuhan		Lokasi
				Rupiah	PLN+PDN	PNBP+BLU	Jumlah	2024	2025	
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(11)
3100.EBC	Penyelenggaraan Pendidikan dan Latihan Polri		3.740.405	3.814.119	-	-	3.814.119	3.740.405	3.814.119	PUSAT
011	Pelatihan	OU	3.740.405	3.814.119	-	-	3.814.119	3.740.405	3.814.119	
	TOTAL		3.740.405	3.814.119	-	-	3.814.119	3.740.405	3.814.119	

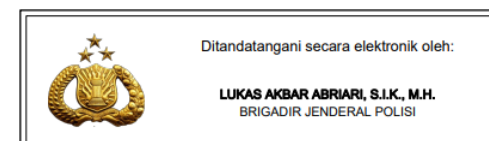
Keterangan :

Kolom (3) : OU = Output Utama, OP = Output Pendukung

Kolom (4) : (Rupiah Non Pendamping + Pendamping)

Kolom (5) : Rupiah = (Rupiah Non Pendamping + Pendamping)

Jakarta, 13 Desember 2024
KEPALA PUSAT KEUANGAN POLRI



Formulir II.3 - 1



FORMULIR 2
RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA (RENJA-KL)
TAHUN ANGGARAN 2025

I. UMUM

1. Nama Kementerian/Lembaga : KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

2. Nama Unit Organisasi : Pusat Keuangan Polri

3. Misi Unit Organisasi :

No	Misi
01	Memperkuat pembinaan fungsi keuangan Polri di pusat sampai ke wilayah;
02	Menjamin penyelenggaraan pengelolaan keuangan Polri yang transparan dan akuntabel;
03	Memperkuat sistem manajemen pusat keuangan yang terintegrasi dan terpercaya.

4. Sasaran Strategis :

No	Sasaran Strategis
01	Terselenggaranya pembinaan, pengendalian, serta verifikasi terhadap pengelolaan keuangan Polri yang modern dan unggul
02	Terselenggaranya pengelolaan keuangan Polri yang transparan dan akuntabel
03	Kelembagaan yang akuntabel dan SDM yang presisi

5. Kode Program : 060.01.BP

6. Nama Program : Program Modernisasi Almitsus dan Sarana Prasarana Polri

7. Pendanaan (Ribu Rupiah)

Pendanaan	Alokasi Tahun 2024	Pagu Anggaran Tahun 2025	Prakiraan Kebutuhan	
			Tahun 2024	Tahun 2025
1. Rupiah	2.691.085.022	454.082.331	2.691.085.022	454.082.331
a. Pendamping	2.665.750.000	-	2.665.750.000	-
b. Non Pendamping	25.335.022	454.082.331	25.335.022	454.082.331
2. PHLN dan PDN	1.388.943.594	3.648.178.009	1.388.943.594	3.648.178.009
JUMLAH	4.080.028.616	4.102.260.340	4.080.028.616	4.102.260.340

II. HASIL/OUTCOME DAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Hasil/Outcome	Indikator Kinerja Utama (IKU)
01 mendukung tugas pembinaan dan operasional polri melalui ketersediaan sarana dan prasarana materiil, fasilitas dan jasa baik kualitas maupun kuantitas.	01 Prosentase/jumlah kecukupan ketersediaan sarana dan prasarana Polri dalam mendukung pendukung tugas Pembinaan dan Operasional Polri guna memenuhi Standar Pelayanan Kamtibmas Prima.



III. KEGIATAN DAN SUMBER PENDANAAN
A. INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK) DAN TARGET

(02) Program Modernisasi Almatsus dan Sarana Prasarana Polri									
Kode	Nama Kegiatan	Sasaran Kegiatan / Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target 2024	Prakiraan Target			Prioritas	Dukungan (PPP/ARG)	Penanggung Jawab
				2024	2025	Satuan			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(8)	(9)	(10)	(11)
3084	Pengembangan peralatan Polri	001 Teknologi Informasi dan Telekomunikasi	68	68	1	UNIT	1	TIDAK	KAPUSKEU
		002 Pemenuhan Alat Material	6	6	-	UNIT	1	TIDAK	KAPUSKEU
		003 Pemenuhan almatsus (sumber PHLN dan PDN) (PN)	97	97	97	UNIT	1	TIDAK	KAPUSKEU
5059	Dukungan Manajemen dan Teknik Sarpras	962 Layanan Umum	12	12	12	LAYANAN	1	TIDAK	KAPUSKEU
		994 Layanan Perkantoran	12	12	12	LAYANAN	1	TIDAK	KAPUSKEU

Keterangan :

Kolom (9) : N = Prioritas Nasional, K/L = Prioritas Kementerian/Lembaga, B = Prioritas Bidang; 0 = Bukan Prioritas

Kolom (10) : PPP = Public Private Partnership ; ARG = Anggaran Responsif Gender

B. SUMBER PENDANAAN

(02) Program Modernisasi Almtsus dan Sarana Prasarana Polri

(Ribu Rupiah)

Kode	Kegiatan/Sasaran Kegiatan/IKK/Output	Jenis Output	Alokasi 2024	Pagu Anggaran Tahun 2025				Prakiraan Kebutuhan		Lokasi
				Rupiah	PLN+PDN	PNBP	Jumlah	2024	2025	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(11)	(12)
3084.CAF	Pengembangan peralatan Polri		25.058.779	34.999.120	-	-	34.999.120	25.058.779	34.999.120	Pusat
063	Teknologi Informasi dan Telekomunikasi	OU	24.998.899	34.999.120			34.999.120	24.998.899	34.999.120	
069	Peralatan Kantor	OU	59.880	-		-	-	59.880	-	
3084.RAF	Pemenuhan Almtsus (Sumber PHLN dan PDN) (PN)		4.054.693.594	-	3.648.178.009	-	3.648.178.009	4.054.693.594	3.648.178.009	Pusat
075	Peralatan sumber PHLN	OU	1.323.872.423	-	3.473.425.700	-	3.473.425.700	1.323.872.423	3.473.425.700	
076	Peralatan sumber RMP	OU	2.665.750.000	-	-	-	-	2.665.750.000	-	
077	Peralatan sumber PDN	OU	65.071.171	-	174.752.309	-	174.752.309	65.071.171	174.752.309	
5059.EBA	Layanan Perkantoran		276.243	418.909.751	-	173.460	419.083.211	276.243	419.083.211	Pusat
002	Operasional dan pemeliharaan kantor	OU	102.783	418.909.751	-	-	418.909.751	102.783	418.909.751	
003	Dukungan operasional pertahanan dan keamanan	OU	173.460	-	-	173.460	173.460	173.460	173.460	
	TOTAL		4.080.028.616	418.909.751	3.648.178.009	173.460	4.102.260.340	4.080.028.616	4.102.260.340	

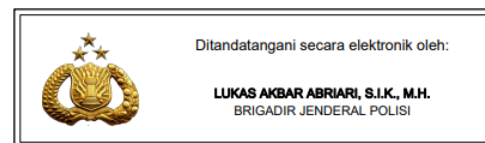
Keterangan :

Kolom (3) : OU = Output Utama, OP = Output Pendukung

Kolom (4) : (Rupiah Non Pendamping + Pendamping)

Kolom (5) : Rupiah = (Rupiah Non Pendamping + Pendamping)

Jakarta, 13 Desember 2024
KEPALA PUSAT KEUANGAN POLRI



Formulir II.3 - 1



FORMULIR 2
RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA (RENJA-KL)
TAHUN ANGGARAN 2025

I. UMUM

1. Nama Kementerian/Lembaga : KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
2. Nama Unit Organisasi : Pusat Keuangan Polri
3. Misi Unit Organisasi :

No	Misi
01	Memperkuat pembinaan fungsi keuangan Polri di pusat sampai ke wilayah;
02	Menjamin penyelenggaraan pengelolaan keuangan Polri yang transparan dan akuntabel;
03	Memperkuat sistem manajemen pusat keuangan yang terintegrasi dan terpercaya.

4. Sasaran Strategis :

No	Sasaran Strategis
01	Terselenggaranya pembinaan, pengendalian, serta verifikasi terhadap pengelolaan keuangan Polri yang modern dan unggul
02	Terselenggaranya pengelolaan keuangan Polri yang transparan dan akuntabel
03	Kelembagaan yang akuntabel dan SDM yang presisi

5. Kode Program : 060.01.BQ
6. Nama Program : Program Pemeliharaan Keamanan Dan Ketertiban Masyarakat
7. Pendanaan (Ribu Rupiah)

Pendanaan	Alokasi Tahun 2024	Pagu Anggaran Tahun 2025	Prakiraan Kebutuhan	
			Tahun 2024	Tahun 2025
1. Rupiah	635.304.659	1.110.334.989	635.304.659	1.110.334.989
a. Pendamping	-	-	-	-
b. Non Pendamping	635.304.659	1.110.334.989	635.304.659	1.110.334.989
2. PHLN dan PDN	-	-	-	-
JUMLAH	635.304.659	1.110.334.989	635.304.659	1.110.334.989

II. HASIL/OUTCOME DAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Hasil/Outcome	Indikator Kinerja Utama (IKU)
01 Memelihara dan meningkatkan kondisi keamanan dan tertib masyarakat agar mampu melindungi seluruh warga masyarakat Indonesia dalam beraktifitas untuk meningkatkan kualitas hidup yang bebas dari bahaya, ancaman dan gangguan yang menimbulkan cedera	01 Jumlah pengamanan pada pesta demokrasi lima tahunan pemilihan presiden/wakil, legislatif baik tingkat pusat maupun daerah



III. KEGIATAN DAN SUMBER PENDANAAN

A. INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK) DAN TARGET

(10) Program Pemeliharaan Keamanan Dan Ketertiban Masyarakat									
Kode	Nama Kegiatan	Sasaran Kegiatan / Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target 2024	Prakiraan Target			Prioritas	Dukungan (PPP/ARG)	Penanggung Jawab
				2024	2025	Satuan			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(8)	(9)	(10)	(11)
3128.EBA	Dukungan Manajemen dan Teknis Pemeliharaan Keamanan dan Keteriban Masyarakat	Layanan perkantoran Harkamtibmas	12	12	12	LAYANAN	U	TIDAK	KAPUSKEU

Keterangan :

Kolom (9) : N = Prioritas Nasional, K/L = Prioritas Kementerian/Lembaga, B = Prioritas Bidang; 0 = Bukan Prioritas

Kolom (10) : PPP = Public Private Partnership ; ARG = Anggaran Responsif Gender

B. SUMBER PENDANAAN

(10) Program Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat

(Ribu Rupiah)

Kode	Kegiatan/Sasaran Kegiatan/IKK/Output	Jenis Output	Alokasi 2024	Pagu Anggaran Tahun 2025				Prakiraan Kebutuhan		Lokasi
				Rupiah	PLN+PDN	PNBP+BLU	Jumlah	2024	2025	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(11)	(12)
3128	Dukungan Manajemen dan Teknis Pemeliharaan Keamanan dan Keteriban Masyarakat		635.304.659	1.110.334.989	-	-	1.110.334.989	635.304.659	1.110.334.989	Pusat
003	Layanan perkantoran Harkamtibmas	OU	635.304.659	1.110.334.989	-	-	1.110.334.989	635.304.659	1.110.334.989	Pusat
	TOTAL		635.304.659	1.110.334.989	-	-	1.110.334.989	635.304.659	1.110.334.989	Pusat

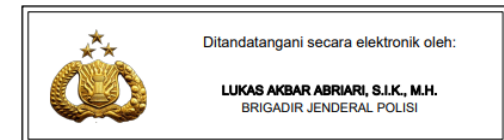
Keterangan :

Kolom (3) : OU = Output Utama, OP = Output Pendukung

Kolom (4) : (Rupiah Non Pendamping + Pendamping)

Kolom (5) : Rupiah = (Rupiah Non Pendamping + Pendamping)

Jakarta, 13 Desember 2024
KEPALA PUSAT KEUANGAN POLRI



FORMULIR 2
RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA (RENJA-KL)
TAHUN ANGGARAN 2025

I. UMUM

1. Nama Kementerian/Lembaga : KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
2. Nama Unit Organisasi : Pusat Keuangan Polri
3. Misi Unit Organisasi :

No	Misi
01	Memperkuat pembinaan fungsi keuangan Polri di pusat sampai ke wilayah;
02	Menjamin penyelenggaraan pengelolaan keuangan Polri yang transparan dan akuntabel;
03	Memperkuat sistem manajemen pusat keuangan yang terintegrasi dan terpercaya.

4. Sasaran Strategis :

No	Sasaran Strategi
01	Terselenggaranya pembinaan, pengendalian, serta verifikasi terhadap pengelolaan keuangan Polri yang modern dan unggul
02	Terselenggaranya pengelolaan keuangan Polri yang transparan dan akuntabel
03	Kelembagaan yang akuntabel dan SDM yang presisi

5. Kode Program : 060.01.WA
6. Nama Program : Program Dukungan Manajemen
7. Pendanaan (Ribu Rupiah)

Pendanaan	Alokasi Tahun 2024	Pagu Anggaran Tahun 2025	Prakiraan Kebutuhan	
			Tahun 2024	Tahun 2025
1. Rupiah	21.414.702.962	20.918.219.770	21.414.702.962	20.918.219.770
a. Pendamping	-	-	-	-
b. Non Pendamping	21.414.702.962	20.918.219.770	21.414.702.962	20.918.219.770
2. PHLN dan PDN	-	-	-	-
JUMLAH	21.414.702.962	20.918.219.770	21.414.702.962	20.918.219.770

II. HASIL/OUTCOME DAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Hasil/Outcome	Indikator Kinerja Utama (IKU)
01 Menyelenggarakan fungsi Manajemen kinerja Polri secara optimal dengan melaksanakan kegiatan perencanaan, Pelaksanaan, Pengendalian, Pelaporan, Pelayanan internal, dan pembayaran gaji yang dilaksanakan secara tepat waktu, akuntabel dan terintegrasi antara mabes polri dan kewilayahan.	01 Prosentase pengelolaan keuangan yang akuntabel dan tepat waktu; 02 Prosentase kecukupan operasional pelaksanaan tugas pelayanan internal.



III. KEGIATAN DAN SUMBER PENDANAAN

A. INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK) DAN TARGET

(01) Program Dukungan Manajemen									
Kode	Nama Kegiatan	Sasaran Kegiatan / Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target 2024	Prakiraan Target			Prioritas	Dukungan (PPP/ARG)	Penanggung Jawab
				2024	2025	Satuan			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(8)	(9)	(10)	(11)
3068.EBA	Pelayanan Administrasi Keuangan Polri	962 Layanan Umum	12	12	12	LAYANAN	1	TIDAK	KAPUSKEU
3068.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal	995 Layanan Manajemen Keuangan	13	13	13	DOKUMEN	1	TIDAK	KAPUSKEU
3073.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal Perkantoran	962 Layanan Umum	12	12	12	LAYANAN	1	TIDAK	KAPUSKEU
3073.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal Perkantoran	994 Layanan Perkantoran	12	12	12	LAYANAN	1	TIDAK	KAPUSKEU
3073.EBC	Layanan Manajemen SDM Internal	996 Layanan Pendidikan dan Pelatihan	100	100	0	ORANG	1	TIDAK	KAPUSKEU

Keterangan :

Kolom (9) : N = Prioritas Nasional, K/L = Prioritas Kementerian/Lembaga, B = Prioritas Bidang; 0 = Bukan Prioritas

Kolom (10) : PPP = Public Private Partnership ; ARG = Anggaran Responsif Gender

B. SUMBER PENDANAAN

(01) Program Dukungan Manajemen

(Ribu Rupiah)

Kode	Kegiatan/Sasaran Kegiatan/IKK/Output	Jenis Output	Alokasi 2024	Pagu Anggaran Tahun 2025				Prakiraan Kebutuhan		Lokasi
				Rupiah	PLN+PDN	PNBP	Jumlah	2024	2025	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(11)	(12)
3068	Pelayanan Administrasi Keuangan Polri		9.919.668	4.828.329	-	6.495.989	11.324.318	9.919.668	11.324.318	
3068.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal		7.966.096	4.372.593	-	5.256.327	9.628.920	7.966.096	9.628.920	
962	Layanan Umum	OU	7.966.096	4.372.593	-	5.256.327	9.628.920	7.966.096	9.628.920	PUSAT
3068.EBA	Layanan Manajemen Kinerja Internal		1.953.572	455.736	-	1.239.662	1.695.398	1.953.572	1.695.398	
995	Layanan Manajemen Keuangan	OU	1.953.572	455.736	-	1.239.662	1.695.398	1.953.572	1.695.398	PUSAT
3073	Dukungan Pelayanan Internal Perkantoran Polri		21.404.783.294	20.906.895.452	-	-	20.906.895.452	21.404.783.294	20.906.895.452	
3073.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal		7.363.162	7.803.634	-	-	7.803.634	7.363.162	7.803.634	
962	Layanan Umum	OU	7.363.162	7.803.634	-	-	7.803.634	7.363.162	7.803.634	PUSAT
3073.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal		21.397.098.655	20.899.091.818	-	-	20.899.091.818	21.397.098.655	20.899.091.818	
994	Layanan Perkantoran	OU	21.397.098.655	20.899.091.818	-	-	20.899.091.818	21.397.098.655	20.899.091.818	PUSAT
3073.EBC	Layanan Manajemen SDM Internal		321.477	-	-	-	-	321.477	-	
996	Layanan Pendidikan dan Pelatihan	OU	321.477	-	-	-	-	321.477	-	PUSAT
	TOTAL		21.414.702.962	20.911.723.781	-	6.495.989	20.918.219.770	21.414.702.962	20.918.219.770	

Keterangan :

Kolom (3) : OU = Output Utama, OP = Output Pendukung

Kolom (4) : (Rupiah Non Pendamping + Pendamping)

Kolom (5) : Rupiah = (Rupiah Non Pendamping + Pendamping)

Jakarta, 13 Desember 2024
KEPALA PUSAT KEUANGAN POLRI

